



**“ANALISIS INTERAKSI DPK, FDR, NPF DAN ASET PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA PENDEKATAN VECTOR ERROR
CORRECTION MODEL (VECM)”**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh

LISA PUTRI SARI
NIM: 2130401078

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1446 H / 2025 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lisa Putri Sari
NIM : 2130401078
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai/ 13 September 2002
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan SKRIPSI saya yang berjudul "ANALISIS INTERAKSI DPK, PEMBIAYAAN, RISIKO DAN ASET PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)" adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiat, apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Januari 2025
Yang membuat pernyataan


Lisa Putri Sari
2130401078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Lisa Putri Sari** Nim. 2130401078 dengan judul "**ANALISIS INTERAKSI DPK, PEMBIAYAAN, RISIKO DAN ASET PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)**". Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang *Munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Batusangkar, Januari 2025

Ketua Program Studi

Pembimbing



Vicy Andriany, M.Ec.Dev
NIP. 19870929 201903 2 009



Mohammad Aliman Shahmi, ME
NIP. 19930829 202203 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Riza F. M. Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Lisa Putri Sari NIM: 2130401078 judul "Analisis Interaksi DPK, FDR, NPF dan Aset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pendekatan Vector Error Correction Model (VECM)" telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Senin, 03 Februari 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Mohammad Aliman Shahmi, ME NIP. 199308292022031002	Ketua Sidang/ Pembimbing		16/02/2025
2.	Husni Shabri, M.Si NIP. 197703132023211008	Anggota I/ Penguji I		14/02/2025
3.	Lili Ramahdani, M.E NIP. 198605192020122009	Anggota II/ Penguji II		11/02/2025

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Lisa Putri Sari, NIM 2130401078, Judul Skripsi “Analisis Interaksi DPK, NPF, FDR Dan Aset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pendekatan Vector Error Correction Model (VECM)” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Masalah dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan aset bank umum syariah lebih kecil dibandingkan konvensional, FDR masih kurang sesuai dengan pertumbuhan aset, dimana rasio FDR mengalami naik turun namun pertumbuhan aset tetap mengalami kenaikan. Tujuan penelitian untuk menjelaskan hubungan DPK, NPF dan FDR dengan total aset bank umum Syariah jangka pendek dan jangka Panjang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang dilihat melalui laporan keuangan. Data diolah menggunakan program *Eviews 12,0*, analisis data menggunakan alat analisis *uji stationer, uji lag optimal, uji stabilitas var, uji kointegrasi, uji kausalitas granger, estimasi VECM, uji response function (IRF)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK terdapat hubungan dengan aset pada Bank Umum Syariah jangka pendek sebesar 44.0%, dan jangka panjang sebesar 66.6%, FDR terdapat hubungan dengan aset pada Bank Umum Syariah jangka pendek sebesar 35.5% dan jangka panjang sebesar 39.9% dan NPF terdapat hubungan dengan aset pada Bank Umum Syariah jangka pendek sebesar 11,0% dan jangka panjang sebesar 70.1%. Hal ini dapat dikatakan bahwa perubahan pada DPK, FDR dan NPF akan memberikan dampak pada perubahan aset Bank Umum Syariah.

Implikasi dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi bank umum syariah di Indonesia dalam merumuskan strategi penghimpunan dana yang efektif. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas perbankan syariah.

Kata Kunci: DPK, FDR, NPF dan Aset

ABSTRACT

Lisa Putri Sari, NIM 2130401078, Thesis Title “Analysis of the Interaction of DPK, NPF, FDR and Assets in Islamic Commercial Banks in Indonesia with the Vector Error Correction Model (VECM) Approach” Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Mahmud Yunus State Islamic University Batusangkar.

The problem in this study is that the growth of Islamic commercial bank assets is smaller than conventional, FDR is still not in accordance with asset growth, where the FDR ratio has fluctuated but asset growth has continued to increase. The purpose of the study was to explain the relationship between DPK, NPF and FDR with the total assets of Islamic commercial banks in the short and long term.

The type of research used is quantitative research. Data collection techniques using documentation techniques seen through financial reports. Data is processed using the Eviews 12.0 program, data analysis using stationary test analysis tools, optimal lag test, var stability test, cointegration test, granger causality test, VECM estimation, response function test (IRF).

Based on the results of the study, it shows that DPK has a relationship with assets in the short term Islamic Commercial Bank of 44.0%, and a long term of 66.6%, FDR has a relationship with assets in the short term Islamic Commercial Bank of 35.5% and a long term of 39.9% and NPF has a relationship with assets in the short term Islamic Commercial Bank of 11.0% and a long term of 70.1%. It can be said that changes in DPK, FDR and NPF will have an impact on changes in Islamic Commercial Bank assets.

The implication of this research is that the results of this study can provide insight for Islamic commercial banks in Indonesia in formulating effective fundraising strategies. The results of this study can be the basis for regulators in formulating policies that support the growth and stability of Islamic banking.

Keywords: DPK, FDR, NPF and Assets

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Batasan Masalah.....	18
D. Rumusan Masalah.....	18
E. Tujuan Penelitian.....	18
F. Manfaat dan Luaran penelitian	19
G. Definisi Operasional.....	20
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Landasan Teori	21
1. Bank Umum Syariah.....	21
2. Aset Perbankan	23
3. Dana Pihak Ketiga (DPK).....	28
4. <i>Financing to Deposito Ratio</i> (FDR)	30
5. <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	33
B. Hubungan Antar Variabel.....	37
C. Kajian Penelitian Terdahulu	39
D. Kerangka Berfikir	43
E. Hipotesis	43

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah Indonesia	51
1. Berdirinya Bank Syariah Indonesia	53
2. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan.....	54
B. Hasil Penelitian.....	57
1. Uji Stationer (<i>Root Test</i>).....	57
2. Uji Uji Lag Optimal	59
3. Uji Stabilitas VAR	61
4. Uji Kointegrasi.....	62
5. Uji Kausalitas Granger.....	63
6. Uji Estimasi VECM	64
7. Uji <i>Impluse Response Function</i> (IRF)	67
C. Pembahasan	69
BAB V PENUTUPAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Aset Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional Periode 2019-2023.....	10
Tabel 1. 2 Perkembangan DPK, NPF, dan FDR Pada BUS	12
Tabel 3. 1 Schedule penelitian	45
Tabel 4. 1 Hasil Uji Stationer Pada Tingkat Level	58
Tabel 4. 2 Hasil Uji Stationer Pada Tingkat First Difference	58
Tabel 4. 3 Hasil Uji Lag Optimal.....	60
Tabel 4. 4 Hasil Uji Stabilitas VAR.....	61
Tabel 4. 5 Hasil Uji Kointegrasi	62
Tabel 4. 6 Hasil Uji Kausalitas Granger	63
Tabel 4. 7 Hasil Uji Estimasi VECM.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	43
Gambar 4. 1 Hasil Uji Stabilitas VAR.....	61
Gambar 4. 2 Hasil Uji <i>Impluse Response Function</i> (IRF)	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah didirikan sebagai bentuk respon positif dari kelompok Ekonom Muslim dan Praktisi Perbankan Muslim serta Para Ulama yang berusaha menampung desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia lembaga keuangan yang mirip dengan Bank Konvensional namun dijalankan dengan nilai dan prinsip Syariah. Perkembangan di dunia perbankan syariah sangat pesat serta tingkat kerumitan yang tinggi, dapat mempengaruhi performa suatu bank. Kerumitan perbankan syariah yang tinggi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah yang ada di Indonesia (Antonio, 2001)

Sejak pendirian Bank Syariah pertama di Indonesia, perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia terus berlanjut dari tahun ke tahun. Salah satu bentuk perkembangannya ialah terbaginya Perbankan Syariah menjadi 3 bagian, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pembagian tersebut juga bentuk komitmen dan dukungan dari pemerintah akan layanan-layanan keuangan yang sesuai dengan aturan Syariah. Disamping itu juga memungkinkan untuk penyesuaian yang lebih baik terhadap kebutuhan pasar, efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Namun pada penelitian ini peneliti hanya membahas tentang BUS saja. Karena perkembangannya lebih signifikan dibandingkan UUS dan BPRS.

Bank Umum Syariah memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam menyediakan alternatif perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi, bank syariah tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga memperhatikan aspek sosial. Salah satu peran utamanya adalah mendorong inklusi keuangan melalui produk-produk yang tidak berbasis bunga, seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli), yang membuat layanan

perbankan lebih dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang selama ini tidak terjangkau oleh bank konvensional. Selain itu, bank syariah turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendukung sektor-sektor *product if*, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor riil yang mempengaruhi perekonomian secara langsung. Dengan demikian, bank syariah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial.

Lemahnya kondisi bank syariah seperti manajemen yang kurang memadai, pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri serta modal yang tidak dapat menutupi risiko yang dihadapi bank dapat menyebabkan kinerja bank syariah menurun. Ketika kinerja bank syariah menurun kepercayaan masyarakat terhadap bank juga akan menurun dan profitabilitas bank pun ikut berpengaruh seperti menurunnya keuntungan bank. (Muhammad, 2014)

Aset bank adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh bank, baik dalam bentuk kas, piutang, pembiayaan, investasi, maupun aset tetap seperti properti dan peralatan. Aset ini mencerminkan kapasitas keuangan bank untuk menjalankan kegiatan operasional, seperti menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, dan mengelola likuiditas. Dalam bank umum syariah, aset juga mencakup investasi berbasis syariah seperti sukuk, pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Pengelolaan aset yang optimal sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Kasmir, 2020).

Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya yang memiliki nilai ekonomi atau dapat menghasilkan manfaat di masa depan. Aset dapat berupa barang berwujud, seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, maupun aset tidak berwujud seperti hak cipta, merek dagang, atau paten (Mulyadi, 2018). Pelemahan dan penguatan aset sering kali terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor ekonomi, pasar, dan keputusan strategis yang diambil oleh individu atau perusahaan. Penguatan

aset dapat terjadi ketika nilai suatu aset meningkat, misalnya karena permintaan pasar yang tinggi, inovasi teknologi, atau kebijakan ekonomi yang mendukung. Aset yang mengalami penguatan, seperti properti atau saham, dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Sebaliknya, pelemahan aset terjadi ketika nilai aset menurun, yang dapat disebabkan oleh kondisi pasar yang buruk, penurunan permintaan, atau perubahan regulasi yang merugikan. Faktor eksternal, seperti resesi ekonomi, inflasi, atau fluktuasi nilai tukar juga dapat menyebabkan penguatan atau pelemahan aset. Dalam konteks pasar modal, misalnya, saham-saham perusahaan dapat menguat atau melemah tergantung pada kinerja perusahaan tersebut, sentimen pasar, atau kondisi makroekonomi secara keseluruhan (Mulyadi, 2018). Selain itu Salah satu penyebab lemahnya pertumbuhan aset perbankan saat ini adalah kecilnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Oleh karena itu, perubahan nilai aset dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih luas dan keputusan-keputusan yang diambil oleh entitas atau individu terkait.

Bagi para pemangku kepentingan, seperti manajemen bank, regulator, dan investor, perkembangan total aset menjadi aspek yang sangat penting untuk dipantau. Sebab, total aset bukan hanya mencerminkan pertumbuhan dan stabilitas lembaga keuangan, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dalam industri perbankan syariah, total aset menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan pesat industri ini di Indonesia, yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Perhatian khusus terhadap total aset mencerminkan bagaimana manajemen bank umum syariah berupaya meningkatkan daya saingnya di tengah kompetisi dengan bank konvensional (Lukman, 2013)

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika total aset di bank umum syariah menunjukkan perkembangan yang menarik. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2021, total aset bank umum syariah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dengan pertumbuhan persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan kepercayaan masyarakat terhadap produk

dan layanan perbankan syariah. Namun, meskipun tren ini positif, pertumbuhan total aset tidak selalu stabil. Pada tahun-tahun tertentu, seperti 2022 dan 2023, terjadi perlambatan pertumbuhan, bahkan di beberapa bank terjadi penurunan total aset. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan yang harus dihadapi oleh industri perbankan syariah dalam mempertahankan momentum pertumbuhan.

Faktor yang memengaruhi perkembangan total aset sangat beragam dan kompleks. Salah satu faktor utama adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), yang mencakup dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. DPK menjadi salah satu sumber utama likuiditas bagi bank, yang kemudian digunakan untuk mendukung aktivitas pembiayaan dan investasi. Menurut Teori Intermediasi keuangan yang dikembangkan oleh Frederich S. Mishkin, menyatakan bahwa ketika DPK meningkat, bank memiliki lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk membiayai aset, seperti pinjaman dan investasi. Peningkatan DPK menunjukkan bahwa bank berhasil menarik lebih banyak simpanan dari masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk memperluas portofolio aset mereka. Dengan kata lain, semakin besar DPK yang dimiliki bank, semakin besar pula kemampuannya untuk meningkatkan asetnya. (Mishkin, 2016).

Secara teoritis, ada hubungan positif antara DPK dan total aset. Ketika DPK meningkat, bank memiliki kapasitas likuiditas yang lebih besar untuk meningkatkan pembiayaan dan diversifikasi portofolio asetnya. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus karena dipengaruhi oleh berbagai risiko, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan fluktuasi kondisi ekonomi makro.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa selama periode 2021–2023, DPK di bank umum syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Misalnya, pada tahun 2021, DPK meningkat hingga 37,95%, yang secara langsung mendorong pertumbuhan total aset. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, meskipun DPK tetap meningkat, dampaknya terhadap total aset cenderung menurun akibat berbagai faktor eksternal, seperti dampak

pandemi, ketidakstabilan ekonomi global, dan perubahan kebijakan moneter. Di sisi lain, faktor internal seperti efisiensi pengelolaan dana dan kualitas pembiayaan juga turut memengaruhi dinamika total aset.

Di samping itu, diversifikasi portofolio aset, baik dalam bentuk pembiayaan di sektor riil yang produktif maupun investasi di instrumen syariah lainnya, membantu bank mempertahankan asetnya dari fluktuasi ekonomi. Dengan berfokus pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki risiko rendah namun memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bank syariah tidak hanya menjaga kestabilan aset tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, dengan demikian, bank syariah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial.

Banyak faktor yang memengaruhi total aset perbankan syariah, peningkatan total aset suatu bank ditentukan pada kemampuan bank dalam menghimpun dana baik dari permodalan ataupun dana dari pihak ketiga. Makin besar modal suatu bank, maka makin tinggi pula *leverage* yang dimiliki oleh bank dalam menghimpun dana pihak ketiga yang memungkinkan pula bank memperbesar *earning* asetnya untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai saham pemilik bank (Masyud, 2004). Total aset Bank Syariah dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (DPK), Modal dan Pendapatan, Dimana ketiganya berpengaruh secara positif terhadap total aset (Setiadi, 2013). Faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah aset, nilainya mencapai 17,5% dari keseluruhan nilai aset (Yuria, 2008).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset adalah kinerja keuangan, diantaranya ialah DPK, FDR Dan NPF. Pada perbankan Syariah, nilai DPK berbanding lurus dengan total pembiayaan. Artinya DPK yang lebih tinggi dapat meningkatkan keuntungan yang dimiliki oleh perbankan Syariah (Annisa, 2021). Sedangkan faktor-faktor mikro yang mempengaruhi pertumbuhan total aset adalah *Net Performing Financing*

(FDR) dan JKB (jaringan Kantor Bank). Sementara itu variabel modal pengaruhnya tidak signifikan terhadap pertumbuhan total aset diduga disebabkan relative kecilnya rasio modal terhadap total aset.

Besar kecilnya aset Bank Syariah ditentukan oleh banyak faktor, jika dilihat dari kinerja manajerial Bank Syariah itu sendiri, efisiensi yang dapat dilakukan sangat mempengaruhi keuntungan yang didapatkan. Strategi penempatan dan pengelolaan dana pihak ketiga serta modal perlu dilakukan dengan setepat-tepatnya agar dapat menambah aset Bank Syariah tersebut. Sementara itu masalah kualitas aktiva produktif juga harus diperhatikan dengan seksama agar tidak menghambat kinerja bahkan mengurangi keuntungan Bank Syariah. Keuntungan dan rencana pengalokasiannya baik untuk dibagikan kepada pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) maupun akan dicadangkan sebagai tambahan modal maupun Cadangan-cadangan antisipasi risiko harus dilakukan dengan sangat baik agar setiap Keputusan yang dilakukan mampu menambah aset Bank Syariah.

Selain berpengaruh terhadap likuiditas total aset juga berpengaruh terhadap pembiayaan dikarenakan total aset menjadi suatu pertimbangan utama dalam keputusan pembiayaan, semakin besar total aset maka akan mempermudah akses perusahaan ke sumber pendanaan (Houston, 2022). Gitman (2020) juga berpendapat bahwa total aset berkorelasi positif dengan kemampuan pembiayaan eksternal, perusahaan dengan total aset besar memiliki risiko kredit lebih rendah. Total aset juga berpengaruh terhadap risiko menurut Brigham dkk (Brigham, Houston, & Joel, 2019) total aset berkorelasi langsung dengan tingkat risiko perusahaan. Dimana, semakin besar total aset maka kompleksitas risiko akan semakin tinggi.

Total aset sangat berkaitan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non-Performing Financing (NPF). DPK berperan sebagai sumber utama peningkatan aset karena dana yang dihimpun dari nasabah digunakan untuk pembiayaan dan investasi. FDR, yang mencerminkan efektivitas penggunaan dana DPK untuk pembiayaan, juga memengaruhi pertumbuhan aset. Pengelolaan FDR yang optimal

mendorong peningkatan aset produktif. Sebaliknya, NPF yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan aset karena meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, hubungan antara total aset, DPK, FDR, dan NPF sangat erat, di mana pengelolaan yang baik dari ketiga indikator ini akan memengaruhi kestabilan dan pertumbuhan total aset bank syariah (Kasmir, 2020).

Total aset merupakan indikator utama dalam mengukur kinerja dan stabilitas keuangan bank umum syariah. Total aset mencerminkan kekuatan bank dalam mengelola dana, baik yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun sumber lainnya, untuk dialokasikan pada pembiayaan dan investasi syariah. Dalam konteks bank syariah, total aset juga menjadi tolak ukur dalam menciptakan kepercayaan masyarakat dan memperluas pangsa pasar perbankan syariah. Semakin besar total aset, semakin tinggi kemampuan bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan produktif berbasis syariah (Kasmir, 2020). Selain itu, total aset penting untuk memenuhi persyaratan regulator seperti ketentuan modal minimum dan likuiditas yang diwajibkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, pengelolaan total aset yang optimal menjadi kunci keberlanjutan operasional dan daya saing bank umum syariah.

Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kualitas pembiayaan dalam bank syariah. Semakin tinggi NPF, semakin rendah kualitas pembiayaan yang dapat menghambat pertumbuhan aset. Namun, pertumbuhan total aset bank umum syariah cenderung tetap positif meskipun NPF meningkat, karena kontribusi aset lain seperti tabungan, deposito, dan investasi sukuk. Pertumbuhan total aset dapat dipengaruhi oleh upaya mitigasi risiko, seperti restrukturisasi pembiayaan dan penguatan manajemen risiko syariah. Studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan NPF hingga tingkat tertentu tidak secara langsung menghambat pertumbuhan aset, karena diversifikasi sumber dana yang baik dapat menjadi penopang (Hamidi dan Ismail, 2022).

Menurut Teori Saunders dan Cornett menjelaskan bahwa peningkatan NPF dapat mengindikasikan masalah dalam manajemen aset dan liabilitas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi total aset bank. Artinya, ketika NPF meningkat, hal ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak pembiayaan yang tidak produktif atau bermasalah, yang dapat mengindikasikan risiko yang lebih tinggi bagi bank. Peningkatan NPF dapat mengurangi kepercayaan investor dan deposan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan aset bank. Dengan kata lain, jika NPF tinggi, bank mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan asetnya karena masalah likuiditas dan risiko yang lebih besar (Saunders, A., & Cornett, 2018).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan total aset di bank umum syariah. Hubungan antara pertumbuhan DPK dan aset bersifat langsung, karena DPK menjadi basis untuk pembiayaan dan investasi yang meningkatkan aset. Bank umum syariah cenderung memperluas jangkauan nasabah melalui produk tabungan syariah dan deposito berjangka untuk meningkatkan DPK. Ketika DPK bertumbuh signifikan, bank memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan portofolio pembiayaan dan investasi syariah, yang pada akhirnya mendorong kenaikan total aset (Hamidi dan Ismail, 2022).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana-dana yang bersumber dari Masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank, Dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat. DPK atau dana yang berasal dari Masyarakat ini merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki oleh suatu bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Hal ini sesuai dengan fungsi dari bank yaitu sebagai Lembaga yang menghimpun dana dari Masyarakat yang kelebihan dana melalui produk-produk simpanan yang ada dalam bank syariah yang diantaranya adalah giro/wadi'ah (*demand Deposit*), deposit (*time deposit*) dan Tabungan (*saving*). (Syukri, 2014)

Financing to Deposit Ratio (FDR) mencerminkan sejauh mana bank syariah memanfaatkan DPK untuk pembiayaan. FDR yang ideal (antara 80-90%) menunjukkan pengelolaan dana yang efisien, yang berkontribusi pada pertumbuhan total aset. FDR yang terlalu rendah mengindikasikan pengelolaan DPK yang tidak optimal, sementara FDR yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko likuiditas. Pertumbuhan total aset bank umum syariah dipengaruhi oleh keseimbangan antara DPK dan pembiayaan yang tercermin dalam FDR, sehingga manajemen FDR yang stabil menjadi salah satu kunci keberlanjutan aset (Hamidi dan Ismail, 2022).

Menurut Teori Koch dan MacDonald menyatakan bahwa hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan aset bank umumnya berhubungan positif. Artinya, ketika FDR meningkat, ini menunjukkan bahwa bank menggunakan proporsi yang lebih besar dari dana yang dihimpun (dari simpanan) untuk memberikan pembiayaan atau pinjaman. Peningkatan FDR dapat mencerminkan bahwa bank sedang memperluas portofolio pinjamannya, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan aset bank (Koch & MacDonald, 2015).

Pertumbuhan pesat aset perbankan syariah beberapa tahun lalu terjadi lantaran kecilnya nilai aset pelaku industri saat ini. Setiap penambahan aset sekecil apa pun akan terlihat signifikan secara persentase. Alasan berikutnya adalah perlambatan terjadi lantaran sulitnya pelaku industri keuangan syariah mencari nasabah pembiayaan. Kesulitan ini didasarkan pada data per semester I/2019. Pada semester pertama 2019, rasio pembiayaan terhadap pendanaan bank syariah (*financing to deposit ratio*/FDR) cukup rendah, mencapai 80%.

Hal ini dampak dari banyaknya dana atau modal bank syariah yang tak disalurkan ke pembiayaan. Per akhir Agustus 2019, Jumlah pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) naik 10,83% secara tahunan menjadi Rp337,6 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan dengan periode yang sama di 2018 yang mencapai 13,48%

year-on-year (yoy) di angka Rp304,6 triliun. diakses pada tanggal 23 september 2024, Berikut adalah data dari pertumbuhan variabel Total Aset:

Tabel 1. 1
Perkembangan Aset Bank Umum Syariah dan
Bank Konvensional Periode 2019-2023

Tahun Periode	Bank Umum Syariah (Miliar Rupiah)	Bank Konvensional (Miliar Rupiah)
2019	350.364	8.212.586
2020	397.073	8.780.681
2021	441.789	9.670.515
2022	531.860	10.581.455
2023	594.790	10.684.050

Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan*

Tabel 1.1 menunjukkan total aset Bank Umum Syariah (BUS) selama tahun 2019 sampai 2023. Aset bus meningkat dari Rp 350.364 Miliar pada tahun tahun 2019 menjadi Rp 594.790 Miliar pada tahun 2023. Pada setiap tahunnya juga terlihat aset BUS terjadi peningkatan, Sempat terjadi lonjakan pertumbuhan pada tahun 2022 dari Rp 441. 789 Miliar pada tahun 2021 ke Rp 531.860 Miliar pada tahun 2022, walaupun terjadi penurunan pertumbuhan pada tahun berikutnya. Meskipun selama 5 tahun ini, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023 pertumbuhan total aset Bank Umum Syariah mengalami pertumbuhan yang baik, namun jika dibandingkan dengan total aset Bank Konvensional, jumlahnya masih relative sangat kecil, dan belum berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan bank Syariah.

Pertumbuhan aset bank syariah lebih kecil dibandingkan bank konvensional disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu, Pertumbuhan DPK Bank syariah lebih lambat dibandingkan pertumbuhan DPK Bank Konvensional. Bank syariah sering kali memiliki produk pembiayaan yang lebih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional, yang dapat mengurangi daya tarik bagi nasabah. Beberapa bank syariah mungkin belum memiliki manajemen yang seefisien bank konvensional, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan aset. Kebijakan dan regulasi yang lebih ketat

untuk bank syariah dapat membatasi kemampuan mereka untuk berkembang dengan cepat. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan bank syariah dapat menghambat pertumbuhan nasabah baru. Bank konvensional sering kali menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif, yang dapat menarik lebih banyak nasabah dibandingkan bank syariah. Bank konvensional mungkin lebih cepat dalam mengadopsi teknologi baru dan inovasi produk, yang membuat mereka lebih menarik bagi nasabah (Faruqi, 2020).

Adapun penyebab pertumbuhan aset bank syariah tidak sama dengan bank konvensional dikarenakan masyarakat umum yang masih kurang memahami prinsip-prinsip perbankan syariah. Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya menyadari manfaat dan keunggulan produk bank syariah, sehingga mereka lebih memilih bank konvensional dan Bank konvensional memiliki keunggulan dalam hal pemasaran dan promosi, serta sering kali menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif. Ini dapat menarik nasabah yang lebih memilih imbal hasil yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan aset bank syariah tidak sama dengan pertumbuhan aset bank konvensional (Faruqi, 2020)

Rasio NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk menangani kredit bermasalah. Semakin tinggi rasio NPF, semakin buruk kualitas kredit yang dapat menyebabkan lebih banyak kredit bermasalah dan semakin rendah total aset bank. Sebaliknya, jika rasio NPF lebih rendah akan berdampak baik pada keuntungan dan pertumbuhan aset perbankan Syariah (Rikka, 2022). Rasio FDR ialah jumlah pembiayaan yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah deposit. Semakin tinggi rasio FDR, pembiayaan yang disalurkan juga akan meningkat. Dengan banyaknya pembiayaan yang diberikan, tingkat likuiditas bank Syariah akan berkurang karena jumlah aset mereka akan berkurang yang dapat mengurangi tingkat pertumbuhan aset (Mega, 2022). Adapun data Tingkat DPK, NPF dan FDR Bank Umum Syariah sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Perkembangan DPK, NPF, dan FDR Pada BUS

Tahun Periode	DPK (Miliar)	NPF (Persen)	FDR (Persen)
2019	288.978	3,23 %	77,91 %
2020	322.853	3,13 %	76,36 %
2021	365.421	2,59 %	70,12 %
2022	429.029	2,35 %	75, 19 %
2023	465. 932	2,10 %	79,06 %

Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan*

Tabel 1.2 menunjukkan data tingkat DPK, NPF, dan FDR Bank Umum Syariah selama periode 2019 sampai tahun 2023. Rasio DPK terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2023 dengan mencapai angka Rp 465.932 Miliar. Rasio NPF terjadi penurunan selama periode 2021 sampai 2023, dari angka 2,59% hingga mencapai angka 2,10%. Dan rasio FDR terjadi penurunan hingga mencapai angka 70, 12 % pada tahun 2021 dari angka 77,91% pada tahun 2019, namun terjadi kenaikan lagi hingga mencapai angka 79,06 pada tahun 2023. Dari data kinerja keuangan antara DPK dan NPF dengan pertumbuhan aset mengalami kenaikan dan NPF mengalami penurunan maka pertumbuhan assetnya akan meningkat. Namun rasio FDR masih kurang sesuai dengan pertumbuhan aset, dimana rasio FDR mengalami naik turun namun pertumbuhan aset tetap mengalami kenaikan.

Adapun hubungan DPK, FDR dan NPF terhadap total aset bank umum syariah yaitu DPK merupakan sumber utama pendanaan bagi bank syariah. Peningkatan DPK akan meningkatkan likuiditas dan kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan. DPK yang tinggi berkontribusi pada pertumbuhan total aset bank. Sedangkan FDR menunjukkan proporsi pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan DPK. FDR yang optimal dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan mendorong pertumbuhan aset. Hubungan positif antara FDR dan total aset menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan dapat meningkatkan total aset bank. Dan NPF mencerminkan kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Tingginya

NPF dapat mengurangi kepercayaan nasabah dan berdampak negatif pada DPK. NPF yang tinggi berpotensi menurunkan total aset karena dapat mengurangi kemampuan bank dalam menarik dana dan memberikan pembiayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DPK (Dana Pihak Ketiga), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), dan NPF (*Non-Performing Financing*) memiliki hubungan terhadap total aset, dengan DPK dan FDR berperan positif, sementara NPF berpengaruh negatif (Mohammad, 2016).

Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator utama perbankan Syariah yang menunjukkan kualitas pembiayaan yang disalurkan. Semakin rendah nilai NPF maka kinerja perbankan dinilai semakin membaik karena kualitas pembiayaan yang membaik (LPKSI, 2017:24). Peningkatan kualitas pembiayaan yang disalurkan bank Syariah diperlihatkan oleh membaiknya rasio *non-performing financing* (NPF) tahun 2019 sampai 2023 yang mengalami penurunan hingga sebesar 2,10% pada tahun 2023. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5% (Almunawwaroh dan Marlina, 2018).

Manajemen aset yang baik menjadi kunci keberlanjutan bank, terutama dalam menghadapi risiko keuangan seperti pembiayaan bermasalah (NPF) atau ketidakstabilan likuiditas. Bank syariah harus memastikan bahwa aset dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan aturan yang ditetapkan oleh regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, pengelolaan aset yang tepat memungkinkan bank untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat. Dalam laporan keuangan, aset menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan di tengah persaingan industri perbankan (Kasmir, 2020).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia, Penelitian yang dilakukan oleh Reni Widyastuti dan Siti Achiria (2018) yang berjudul “Determinan yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank

Umum Syariah di Indonesia 2015-2016”. Hasil penelitian tersebut menyatakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap total pertumbuhan aset bank syariah. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variable *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga dan inflasi serta periode yang lebih baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Djuwita dan Assa Fito Mohammad (2016) yang berjudul “Pengaruh Total DPK, FDR, NPF dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel DPK, FDR, ROA, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap total aset bank syariah. Secara parsial, hanya DPK, FDR, dan NPF yang berpengaruh signifikan, sedangkan ROA tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variable independen yang digunakan yaitu Return On Assets (ROA).

Diamantin Rohadatul Aisy dan Imron Mawardi (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2006-2015”. Hasil penelitian menunjukkan Faktor Eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap Faktor Internal dan Faktor internal dan Eksternal tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Aset. Serta Faktor-faktor dari yang paling mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah adalah faktor internal, faktor eksternal melalui faktor internal, serta faktor eksternal secara langsung. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Syawal Harianto (2017) yang berjudul “Rasio Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia”. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu ROA. Objek penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu Bank Pengkreditan Rakyat Syariah.

Persamaan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian regresi linier berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Okyviandi Putra Erlangga dan Imron Mawardi (2016) yang berjudul “Pengaruh Total Aktiva, Capital Adequacy Ratio (CAR), Finance To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014”. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu Return On Assets (ROA), serta periode yang lebih baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Eka Purnamasari dan Musdholifah (2016) yang berjudul “Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 2015”. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu resiko pembiayaan. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah PDB, inflasi , nilai tukar, CAR, ROA, BOPO dan ukuran bank. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu regresi linier berganda.

Penelitian ini terkait total asset di industry perbankan syariah sebenarnya sudah banyak dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan. Sebagian besar penelitian menggunakan metode analisis regresi atau korelasi untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel seperti DPK, Pembiayaan, dan Risiko dengan total asset, namun penggunaan metode *Vector Error Correction Model* (VECM) dalam menganalisis hubungan dinamis antar variabel tersebut masih relative sedikit. Padahal metode ini memiliki keunggulan dalam menjelaskan hubungan jangka pendek dan jangka Panjang secara simultan, yang dapat memberikan Gambaran lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi total asset.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya bahwasannya sudah banyak yang membahas dan meneliti ini, namun dari sekian banyak yang meneliti tersebut belum ada yang menggunakan metode VECM dan yang membahas dan melihat menggunakan VECM ini masih relative kecil. Penelitian ini

merupakan sebuah studi kasus untuk menganalisis hubungan DPK, FDR, NPF dan Total Aset secara sistematis. Berdasarkan variabel yang dibentuk, maka data yang digunakan pada penelitian ini adalah data tahunan periode 2019-2023. Data ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan yang dipublikasikan secara resmi.

Metode analisis data pada penelitian ini adalah VECM. Pada dasarnya ada banyak metode yang digunakan dalam analisis ekonometrika. Analisis tersebut bertujuan untuk memodelkan hubungan antara variabel-variabel. Variabel tersebut dapat berupa variabel deret waktu. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam analisis deret waktu dengan variabel (multivariat) yaitu, analisis *vector autoregressive* (VAR) dan *vector error correction model* (VECM). Analisis VAR merupakan analisis peramalan deret waktu multivariat yang paling sering digunakan untuk memprediksi data stationer. Menurut Sim (1980) VAR biasanya digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel variabel-variabel deret waktu, menganalisis hubungan system variabel-variabel deret waktu dan menganalisis dampak dinamis dari factor gangguan yang terdapat dalam system variabel tersebut. Ketika data tidak stationer dan terdapat hubungan kointegrasi maka VAR terestriksi yang digunakan untuk menganalisis data membuat model yang mempunyai hubungan jangka Panjang dann pendek terhadap variabel yang mempunyai masalah non stationer disebut juga VECM (Sari, 2015).

Analisis VECM merupakan analisis yang dikembangkan oleh Engle dan Granger (1987) untuk melakukan rekonsiliasi perilaku ekonomi jangka pendek dengan variabel ekonomi jangka Panjang (Gujarati, 2004). Konsep penting dalam VECM adalah keseimbangan jangka Panjang dari data deret waktu yang sering disebut kointegrasi. Kointegrasi merupakan kobinasi linier dari variabel yang tidak stationer dan terintegrasi pada ordo yang sama. Kointegrasi bertujuan untuk mengetahui hubungan keseimbangan dalam jangka Panjang dan antara perubah-ubah yang diamati (Endres, 2008). Analisis VECM juga disebut sebagai model VAR retriksi dengan data tidak stationer namun terdapat hubungan kointegrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan VECM untuk menganalisis hubungan antara DPK, pembiayaan, dan risiko dengan total aset di bank umum syariah. Selain mengonfirmasi hubungan teoritis antar variabel, penelitian ini juga memberikan analisis empiris berdasarkan data terbaru dari tahun 2021 hingga 2023, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik di bidang perbankan syariah (OJK, 2021).

Metode VECM juga digunakan untuk analisis hubungan jangka panjang antara variabel-variabel tersebut, serta dinamika jangka pendek yang terjadi. Metode Ini penting untuk memahami bagaimana perubahan dalam DPK, FDR, dan NPF mempengaruhi total aset dalam waktu yang berbeda. Sehingga hasil analisis VECM dapat digunakan oleh manajemen bank untuk membuat keputusan strategis terkait pengelolaan DPK, FDR, dan NPF, serta untuk merencanakan pertumbuhan aset di masa depan. Maka, dapat disimpulkan analisis VECM memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara DPK, FDR, NPF, dan total aset, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan bank umum syariah.

Berfokus pada pertumbuhan total aset bank umum Syariah dan kemudian diikuti dengan DPK, FDR, dan NPF, maka penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara DPK, FDR, NPF dan Total Aset Bank Umum Syariah dengan mengambil judul “**Analisis Interaksi DPK, FDR, NPF dan Aset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pendekatan Vector Error Correction Model (VECM)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fakta dan data yang dijelaskan di latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah ialah:

1. Pertumbuhan aset bank umum syariah lebih kecil dibandingkan konvensional

2. FDR masih kurang sesuai dengan pertumbuhan aset, dimana rasio FDR mengalami naik turun namun pertumbuhan aset tetap mengalami kenaikan.
3. Terdapat perbedaan hasil riset yang menunjukkan mengenai variabel. Hal ini menciptakan “*research gap*” yang memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami hubungan variabel-variabel tersebut.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan terarah maka penulis membatasi penelitian pada variabel hanya empat variabel yang dianalisis yaitu, DPK, FDR, NPF dan Total Aset Bank Umum Syariah. Analisis hanya mencakup data Bank Umum Syariah Di Indonesia pada periode 2019-2023. Analisis yang digunakan metode VECM untuk mengidentifikasi hubungan jangka pendek dan jangka Panjang antara variabel. Sumber data diperoleh dari sumber resmi seperti OJK.

D. Rumusan Masalah

Dari Batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Total Aset Bank Umum Syariah Di Indonesia jangka pendek dan jangka Panjang?
2. Bagaimana hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam Total Aset Bank Umum Syariah Di Indonesia jangka pendek dan jangka Panjang?
3. Bagaimana hubungan *Non Performing Financing* (NPF) dalam Total Aset Bank Umum Syariah Di Indonesia jangka pendek dan jangka Panjang?

E. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah disampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam total aset Bank Umum Syariah di Indonesia jangka pendek dan jangka panjang

2. Untuk menganalisis hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam total asset Bank Umum Syariah di Indonesia jangka pendek dan jangka panjang
3. Untuk menganalisis hubungan *Non Performing Financing* (NPF) dalam Total Aset Bank Umum Syariah Di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka Panjang.

F. Manfaat dan Luaran penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan ikut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terutama pada bidang ekonomi dan keuangan Syariah. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pengaruh DPK, FDR, dan NPF Terhadap Total Aset Bank Umum Syariah Di Indonesia.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi Pustaka Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar diterbitkan di jurnal ilmiah.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman serta mempermudah pemahaman dalam masalah yang penulis maksud, maka perlu dijelaskan istilah-istilah dalam penelitian ini.

1. **DPK (Dana Pihak Ketiga)** merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. DPK terdiri dari giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito (time deposit) yang dalam praktik perbankan syariah menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah (Kasmir, 2014).
2. ***Financing to Deposit Ratio (FDR)*** adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank (Muhammad, 2014).
3. ***Non Performing Financing (NPF)*** merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, dimana semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk (Rivai dan Arifin, 2013).
4. **Total aset** bank umum syariah merupakan sumber daya yang dikuasai oleh bank syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi bank syariah di masa depan. Total aset meliputi kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, pembiayaan yang diberikan, penyertaan, dan aktiva tetap (Ismail, 2013).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Bank Umum Syariah

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 dalam Pasal 1 mengatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, Bank terdiri atas dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran (Kasmir, 2012)

Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008, bank adalah badan simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank Umum Syariah (BUS) ialah satu jenis bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Bank Umum Syariah ialah Bank Yang Mnejalankan segala kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan alau lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah Lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islamiah. Perbankan syariah selaku salah satu Lembaga keuangan syariah adalah suatu system perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam. Dimana Perbankan syariah memiliki kegiatan yang sama seperti Perbankan Konvensional, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, serta penyediaan jasa perbankan (M Anang, 2019)

Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Ismail, 2014).

Kegiatan Bank Umum Syariah memiliki berbagai aktivitas yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, Tabungan, atau bentuk lainnya berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank syariah juga menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam operasionalnya, bank syariah dapat membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indoensia. Bank syariah juga dapat membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah. Disamping itu, bank syariah dapat menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.

Bank umum syariah adalah bank yang beroperasi tidak berlandaskan pada sistem bunga. Bank syariah ini merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya dan produknya berlandaskan pada prinsip syariah. Pada bank syariah ini memberikan usaha berupa pembiayaan dan jasa-jasa dalam setiap transaksinya disesuaikan dengan prinsip dalam syariat Islam (Antonio, 2001). Istilah lain pada bank syariah ini biasa disebut dengan bank Islam. Secara akademik, dalam penyebutan bank Islam dan bank syariah memiliki arti yang berbeda. Akan tetapi secara teknis untuk penyebutan bank Islam dengan syariah ini memiliki pengertian yang sama. Bank syariah ini merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk memperlancar mekanisme dalam perekonomian sektor riil melalui aktivitas usahanya berupa pembiayaan, jual-beli, bagi hasil, investasi atau lainnya yang berdasarkan dan berpegang teguh pada prinsip syariah yaitu sebuah aturan berdasarkan pada hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain (Ascarya, 2008).

2. Aset Perbankan

FASB mendefinisikan aset sebagai *berikut Asset are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events.* (Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu (Suwardjono, 201)

Aset menurut SAK adalah sumber daya yang dikuasai oleh sebuah sebagai hasil dari peristiwa lampau dan diharapkan mengalirkan keuntungan dimasa mendatang bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, suatu sumber daya yang dikuasai, meskipun tidak dimiliki, harus dianggap sebagai aset yang harus dikelola oleh perusahaan (Martani, 2016).

Aset adalah sarana atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Aset juga merupakan kemungkinan keuntungan ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikontrol oleh

entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian dimasa lalu (Hery, 2017).

Aset atau aktiva adalah harta atau sumber ekonomi yang dimiliki Perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat usaha dalam operasi Perusahaan. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Penegertian aset ini dikemukakan oleh berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Menurut *Accounting Standard Board* (APB) Statement (1970) dikemukakan bahwa: “kekayaan ekonomi Perusahaan termasuk didalam pembebanan yang ditunda yang dinilai dan diakui sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.”
- b. *Financial Accounting Standard Board* (FASB) (1985) memberikan definisi sebagai berikut: “asset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh Lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang lalu.”
- c. Berdasarkan definisi tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa sesuatu dianggap sebagai aset jika di masa yang akan datang dapat diharapkan memberikan *net cash inflow* yang positif kepada Perusahaan.

Total aset sebagai ukuran suatu bank dapat menentukan pengaruh bank syariah terhadap perekonomian Indonesia. Dalam Cleopatra, Karim menjelaskan bahwa ukuran bank syariah harus ditingkatkan karena dua alasan. Yang pertama, kestabilan ekonomi di Indonesia. Bank syariah menurutnya lebih tahan terhadap krisis jika dibandingkan dengan bank konvensional, maka semakin banyak syariah 15 diharapkan semakin membuat perekonomian Indonesia lebih baik. Kedua, kemampuan untuk menarik dana syariah diluar negeri. Semakin besar bank syariah, maka kemampuan untuk menarik dana investor Islam semakin besar .

Menurut (Horngern dan Harrison, 2007) Aset adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat komersial di masa depan. Asset perbankan memiliki hak penuh dan dapat digunakan dalam transaksi perbankan komersial seperti bangunan, merek dagang, paten, teknologi, uang tunai, mobil, dan lainnya. Pendapat Faud (2016) dalam (R. O. Putra,

2018) tentang asset, asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai. Dimiliki oleh bank/pemerintah sebagai akibat dari dan peristiwa masa lalu lainnya dan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan. Diperoleh baik oleh bank, negara maupun Masyarakat, dan diukur dalam mata uang, termasuk sumber daya non-keuangan diperlukan untuk menyediakan layanan dan sumber daya kepada public. Sumber daya dilindungi karena alasan Sejarah dan budaya. Definisi umum dari aset atau kekayaan bank adalah segala hak yang dapat dimiliki.

Total aset adalah total dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh Perusahaan atau Lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjang operasional Perusahaan atau lembaga keuangan tersebut. Pertumbuhan aset adalah pertumbuhan total aktiva lancar yang ditambah dengan pertumbuhan total aktiva lancar yang ditambah dengan pertumbuhan total aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun dalam perputaran kegiatan Perusahaan yang normal).

Pertumbuhan aset adalah pertumbuhan total aktiva lancar, yang ditambah dengan pertumbuhan total aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi, dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun dalam perputaran kegiatan Perusahaan yang normal). Adapun aset atau aktiva bank syariah meliputi kas, piutang pembiayaan, aset (persediaan), aktiva *ijarah*, aktiva *isthisna* dalam penyelesaian, penyaluran Dana Investasi Terikat (DIT), pinjaman *Qardh*, dan penyertaan (Ali Maulidi, 2016).

Dalam teori fundamental dikemukakan oleh Eugene F. Fama dalam bukunya yang berjudul "The Theory of Finance" menjelaskan bahwa pertumbuhan aset sangat dipengaruhi oleh efisiensi pasar dan bagaimana informasi tercermin dalam harga aset (Eugene, 1972). Teori ini kemudian diperkuat oleh pemikiran Robert C. Merton melalui bukunya

“Continuous-Time Finance” yang membahas bagaimana aset berkembang secara dinamis sepanjang waktu melalui proses yang berkelanjutan (Robert, 1990).

Aktiva dibagi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Adapun yang termasuk dalam aktiva lancar adalah kas, investasi jangka pendek, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, biaya yang dibayar dimuka. Sedangkan yang termasuk dalam aktiva tidak lancar adalah yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi Perusahaan, seperti investasi jangka Panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, beban yang ditangguhkan dan aktiva lain-lain.

Menurut Brigham dan Erhart (2005), Perusahaan dengan Tingkat pertumbuhan yang tinggi akan bergantung pada dana dari luar Perusahaan dikarenakan dana dari dalam Perusahaan tidak mencukupi untuk mendukung Tingkat pertumbuhan yang tinggi. Dengan demikian Perusahaan dengan Tingkat pertumbuhan yang tinggi akan lebih banyak menggunakan utang sebagai sumber pendanaannya daripada Perusahaan dengan Tingkat pertumbuhan yang rendah.

Aset perbankan syariah meliputi kas, penempatan dana Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, pembiayaan yang diberikan, penyertaan, penyisihan penghapusan Aktiva Produktif, Aktiva Tetap dan Investasi, serta Rupa-rupa Aktiva. Aset adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan misalnya kas, persediaan, aktiva tetap, aktiva yang tidak berwujud, dan lain-lain. Aktiva ini lazimnya di Indonesia dan Amerika ditempatkan di sbelah kiri. Sedangkan beberapa Negara Eropa lazimnya ditempatkan di sebelah kanan. Jenis-jenis aset yaitu (Sugiri dan Riyono, 2014):

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan sumber daya ekonomi lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau habis dipakai dalam rentang waktu satu tahun.

b. Aset Investasi Jangka Panjang

Aset investasi jangka panjang adalah penanaman di luar perusahaan dalam jangka panjang dengan maksud untuk menguasai perusahaan lain atau memperoleh pendapatan tetap atau memperoleh kenaikan nilai.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah sumber-sumber ekonomik yang berwujud yang perolehannya sudah dalam kondisi siap untuk dipakai atau dengan membangun lebih dahulu, aset tetap dapat dimanfaatkan secara permanen atau dalam rentang waktu lebih dari satu tahun. Misal: mesin, gudang, kendaraan, dan peralatan kantor.

d. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud mencerminkan hak-hak istimewa atau kondisi yang menguntungkan perusahaan dalam mencapai pendapatan. Aset tak berwujud dapat diperoleh dengan membeli dari pihak luar atau dengan mengembangkannya sendiri.

e. Aset lain-lain

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan tidak berwujud. Contoh: gedung yang masih dalam proses pembangunan dan aset pajak tangguhan.

Rumus mencari Pertumbuhan Aset adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset}_t - \text{Total Aset}_{t-1}}{\text{Total Aset}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

TAt = Total Aset tahun t

$TAt-1$ = Total Aset untuk tahun sebelumnya

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah simpanan yang tidak terikat dan dipercayakan Nasabah Pihak ketiga bukan Bank kepada Bank Umum Syariah (BUS) berupa Tabungan, deposito, giro, maupun bentuk lainnya. Prinsip syariah yang diterapkan dalam operasional penghimpunan dana Masyarakat adalah prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Dalam Teori Manajemen Likuiditas Bank Teori ini menjelaskan bahwa DPK merupakan sumber dana utama bank yang digunakan untuk mendanai aset-aset produktif (Kasmir, 2014). Dan dalam Teori Asset-Liability Managemen Theory menjelaskan pentingnya pengelolaan struktur dan kewajiban bank, termasuk DPK, untuk mengoptimalkan profitabilitas sambil menjaga risiko likuiditas (Julius R, 2017)

Dana pihak ketiga adalah sumber dana yang diperoleh dari simpanan masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional suatu bank. Dana pihak ketiga (simpanan) menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.

Dana pihak ketiga atau yang biasa disingkat dengan DPK adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari Masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Kuncoro, 2002). Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari Masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh Masyarakat kepada bank dapat berupa giro, Tabungan, dan deposito.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS

berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Kasmir (2014), 80% sampai 90% dari dana yang dikelola oleh bank syari'ah merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank terdiri dari tiga jenis yaitu: Giro, deposito dan tabungan. Yang termasuk dalam dana pihak ketiga adalah :

- a. Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu secara tunai menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Giro merupakan simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada bank yang dalam penarikannya dapat dilakukan sewaktu waktu menggunakan cek, bilyet atau pemindah bukuan. Giro merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
- c. Deposito merupakan simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah atau UUS.

Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan. Semakin besar penyaluran pembiayaan pada bank maka dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat. Bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai *financial intermediary*, setelah berhasil menghimpun dana dari Masyarakat bank syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan (Syukri, 2014)

4. *Financing to Deposito Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang disalurkan. Rasio ini harus terkontrol pada posisi tertentu yaitu 75%-100%. Apabila rasio FDR berada di bawah 75% maka bank berada pada kondisi yang kelebihan *likuiditas* dan apabila rasio FDR berada di atas 100% maka bank dalam kondisi kurang *likuid*. Berdasarkan kriteria dari Bank Indonesia, rasio FDR yang sebesar 115% ke atas memiliki nilai Kesehatan *likuiditas* pada suatu bank adalah nol (Sumartik, 2018)

Dalam teori Likuiditas menjelaskan bahwa bank harus memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya, terutama dalam pembiayaan. FDR merupakan indikator penting dalam mengukur likuiditas bank (Antonio, 2015). Dan dalam teori Loan to Deposit Theory menjelaskan hubungan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan dana yang dihimpun. Teori ini menjadi dasar pengembangan konsep FDR dalam perbankan syariah (Karim, 2016)

Secara umum, *likuiditas* merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana *cash flow* dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, sedangkan *likuiditas* bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. *Likuiditas* penting bagi suatu bank syariah untuk menjalankan fungsinya terhadap pinjaman dan memberikan *fleksibilitas* dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. *Likuiditas* yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil agar tidak berpengaruh terhadap kebutuhan operasional

sehari-hari. Namun, juga tidak boleh terlalu besar karena hal tersebut dapat menurunkan efisiensi yang akan berdampak pada rendahnya Tingkat *profitabilitas* (Irham, 2014)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah tingkatan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Ketika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun akan menguntungkan, tapi hal ini berrisiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya.

Secara lebih rinci *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dijelaskan sebagai rasio antara seluruh jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank dengan dana yang telah diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya standar nilai FDR menurut Bank Indonesia adalah antara 80%-110% (Andriaan Sudianto, 2013).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima dari masyarakat oleh bank. Jika rasio tersebut semakin besar maka memberikan indikasi semakin kecilnya kemampuan likuiditas bank. Berkurangnya tingkat likuiditas dapat berdampak terhadap naiknya *profitabilitas* bank.

Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap tingkat *profitabilitas*. Karena dengan tingginya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka penyaluran dana untuk pembiayaan kepada masyarakat semakin besar, sehingga dari berbagai pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan *profitabilitas* Bank Syariah (Andriaan Sudianto, 2013).

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran bank Indonesia No. 12/11/DPNP/2010, besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang mencerminkan likuiditas bank sehat adalah 85%-110%. Apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada diatas atau dibawah 85%-110%,

maka 20 dalam hal ini dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi dengan baik.

Dendawijaya (2014), jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka dibawah 80% (misalkan 60%) maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan dana sebesar 60% dari seluruh dana yang dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar Kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar.

Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 110% berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dari dana yang dihimpun. Oleh karena itu, dana yang dihimpun dari masyarakat menjadi sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai peihak intermediasi (perantara) dengan baik.

Semakin tinggi nilai FDR dapat menunjukkan semakin besar pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah. Apabila FDR semakin tinggi maka kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan juga akan semakin tinggi sehingga bank akan lebih tertarik untuk menyalurkan pembiayaan pada periode berikutnya (Rizki Farianti, 2019). Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan semakin riskan kondosi *likuiditas* pada

suatu bank dan apabila semakin rendah rasio FDR maka hal tersebut menunjukkan bahwa bank kurang efektif dalam menyalurkan pembiayaan. Apabila rasio FDR pada suatu bank terletak pada posisi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka keuntungan yang diperoleh bank akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut memiliki kemampuan untuk menyalurkan pembiayaan secara efektif).

Pembiayaan yang diberikan merupakan keseluruhan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Sedangkan total dana pihak ketiga merupakan total penghimpunan dana dari Masyarakat yang dikumpulkan oleh pihak bank melalui produk giro, Tabungan dan deposito berjangka (Erlyta, 2014). Perhitungan FDR bertujuan untuk mengetahui dan melihat sejauh mana kemampuan bank memiliki kondisi sehat dalam melakukan kegiatan usahanya (Vani, 2013).

5. *Non Performing Financing* (NPF)

Risiko terbesar yang dihadapi bank syariah ketika menyalurkan pembiayaan adalah terjadinya pembayaran pengambilan dana yang tersendat-sendat dan bahkan pengembalian dana pinjaman yang dilakukan mengalami kemacetan. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* merupakan kegagalan dari pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit (Dendawijaya, 2005).

Dalam teori Risiko Kredit teori ini menjelaskan bagaimana risiko gagal bayar dapat mempengaruhi kualitas aset bank dan pentingnya manajemen risiko kredit (Imam Wahyudi, 2013). Dan dalam teori Theory of Finacial Intermediation menjelaskan peran bank sebagai intermediary keuangan dan pentingnya menjaga kualitas pembiayaan untuk mempertahankan fungsi intermediasi (Muhammad, 2014)

Salah satu risiko yang ditemui oleh bank ialah risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan kepada masyarakat atau

disebut dengan risiko kredit. Menurut Dahlan Siamat risiko kredit merupakan: “Suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.” (Djuwita dan Mohammad 2016).

Risiko kredit atau pembiayaan pada bank syariah disebut dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi atau menyanggupi pengembalian pembiayaan dan margin dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. *Non Performing Financing* (NPF) tidak hanya berupa risiko pembiayaan namun terdapat juga risiko investasi, karena beberapa akad dalam produk pembiayaan bank syariah ada yang menggunakan mekanisme investasi seperti akad mudharabah dan musyarakah. (Djuwita dan Mohammad 2016).

Peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan timbulnya masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank harus selalu menjaga pembiayaan agar tidak dalam posisi *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi. Bank Indonesia menetapkan tingkat NPF yang wajar adalah kurang dari atau sama dengan 5% dari total pembiayaan.

Semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) akan memperkecil profitabilitas bank karena dana pembiayaan yang tidak dapat ditagih mengakibatkan bank tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas bank akan terganggu (Almunawwaroh, & Marlina 2018).

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 9 Ayat 2, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar

(L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). (Aziza dan Mulazid, 2017).

Menurut Ismail (2014), ada 2 faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

a. Faktor Intern Bank

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.
- 2) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 3) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan memonitor kredit debitur.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.

b. Faktor Ekstern Bank

- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
 - a) Nasabah sengaja tidak membayar angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
 - c) Penyelewengan dengan menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.
- 2) Unsur ketidaksengajaan
 - a) Debitur mau melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
 - b) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha ddebitur
 - c) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Beberapa pengertian dari kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Kredit memungkinkan timbulnya risiko di kemudian hari.
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran Kembali pokoknya ataupun pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran Kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar Kembali kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang menjadi keinginan pihak bank.
- e. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan yang berpotensi menunggak.

NPF di kategorikan dalam *kolektibilitas* kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia (BI) telah menetapkan besarnya rasio NPF, yaitu NPF yang berkisar antara 2%-5% di kategorikan baik, 5%-8% dikategorikan cukup baik, 8%-12% di kategorikan kurang baik dan > 12% dikategorikan tidak baik. Pengukuran pembiayaan bermasalah menggunakan analisis rasio keuangan bank atau rasio *likuiditas* dengan cara menghitung pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Apabila NPF semakin rendah maka bank di kategorikan memiliki kemampuan dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Sebaliknya, apabila Tingkat NPF tinggi maka bank dikategorikan tidak mampu dalam melakukan penyaluran pembiayaan, sehingga bank akan mengalami kerugian sebagai akibat buruk dari Tingkat pengembalian kredit macetnya.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) dengan total aset Bank Umum Syariah.

Teori Intermediasi keuangan yang dikembangkan oleh Frederich S. Mishkin, menyatakan bahwa ketika DPK meningkat, bank memiliki lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk membiayai aset, seperti pinjaman dan investasi. Peningkatan DPK menunjukkan bahwa bank berhasil menarik lebih banyak simpanan dari masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk memperluas portofolio aset mereka. Dengan kata lain, semakin besar DPK yang dimiliki bank, semakin besar pula kemampuannya untuk meningkatkan asetnya. (Mishkin, 2016).

Hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) dengan total aset Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan keterkaitan yang kompleks dalam operasional perbankan syariah. Menurut penelitian Almunawwaroh dan Marlina (2018), DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap total aset, dimana peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga secara langsung mendorong pertumbuhan aset bank. Sementara itu, FDR sebagai rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga mempengaruhi kemampuan bank dalam mengelola likuiditas dan mengoptimalkan penggunaan aset, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias (2019)

Teori manajemen perbankan dan intermediasi keuangan. menyatakan bahwa hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan aset bank umumnya berhubungan positif. Artinya, ketika FDR meningkat, ini menunjukkan bahwa bank menggunakan proporsi yang lebih besar dari dana yang dihimpun (dari simpanan) untuk memberikan pembiayaan atau pinjaman. Peningkatan FDR dapat mencerminkan bahwa bank sedang memperluas portofolio pinjamannya, yang pada gilirannya

dapat berkontribusi pada pertumbuhan aset bank (Koch & MacDonald, 2015).

Hubungan NPF terhadap aset dalam teori Asset Quality Theory menjelaskan pentingnya kualitas aset dalam menentukan kesehatan bank, dimana NPF menjadi indikator utama kualitas aset produktif (Adiwarman, 2017). Dan dalam teori Risk Return-of Theory menjelaskan hubungan antara risiko (termasuk NPF) dengan return yang diharapkan dari aset (Tariqullah Khan, 2008)

NPF sebagai indikator kualitas pembiayaan memiliki pengaruh negatif terhadap total aset bank syariah, dimana peningkatan NPF dapat menurunkan nilai aset produktif dan menghambat pertumbuhan aset secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh penelitian Sudarsono (2020) yang menemukan bahwa tingkat NPF yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan efisiensi pengelolaan aset dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah. FDR yang optimal, didukung oleh pengelolaan NPF yang baik, menciptakan siklus positif dimana bank dapat mengoptimalkan penggunaan DPK untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan total aset.

Penelitian komprehensif oleh Wahyudi dan Dewi (2021) mengungkapkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah. DPK berperan sebagai fondasi utama dalam pembentukan aset, FDR menunjukkan efektivitas bank dalam mengelola dana untuk pembiayaan, sementara NPF menjadi indikator kualitas aset produktif yang mempengaruhi kesehatan bank secara keseluruhan. Keseimbangan antara ketiga faktor ini menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan aset yang berkelanjutan dan sehat dalam operasional bank syariah.

C. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Djuwita dan Assa Fito Mohammad (2016) yang berjudul “Pengaruh Total DPK, FDR, NPF dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel DPK, FDR, ROA, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap total asset bank syariah. Secara parsial, hanya DPK, FDR, dan NPF yang berpengaruh signifikan, sedangkan ROA tidak berpengaruh signifikan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu DPK, FDR, dan NPF. Namun pada penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu, peneliti menggunakan metode VAR/VECM dan menggunakan periode 2019-2023.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Diamantin Rohadatul Aisy dan Imron Mawardi (2016) yang berjudul “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2006-2015”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa factor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap factor internal. Namun, keduanya factor eksternal dan factor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan pada peneliti yaitu DPK, FDR, dan NPF. Juga untuk perbedaan metode pada penelitian menggunakan VAR/VECM namun pada penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu, peneliti menggunakan periode 2019-2023 dan fokus mengukur hubungan jangka panjang dan jangka pendek tiap variabel secara parsial menggunakan metode VAR/VECM.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti (2018) yang berjudul “*Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) memiliki efek positif yang signifikan terhadap ROA. FDR (pembiayaan utang rasio), DPK, dan Tingkat bagi hasil berpengaruh pada ROA. Serta

pembiayaan bermasalah (NPF tidak berpengaruh pada ROA. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan penulis adalah ada pada variabel yang digunakan, pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti menggunakan *Return on Assets* (ROA), sedangkan variabel yang penulis gunakan adalah Total Aset.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Assa Fito Mohammad (2016) yang berjudul “pengaruh total DPK, FDR, NPF dan ROA terhadap total aset bank umum syariah di Indonesia tahun 2011-2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, FDR, ROA dan NPF berpengaruh secara signifikan terhadap total aset bank umum syariah. Sementara secara parsial semua variabel berpengaruh signifikan terhadap total aset. Variabel DPK, FDR dan NPF berpengaruh positif terhadap total aset bank syariah.
5. Penelitian yang dilakukan Ahmad Fadlan Lubis (2016) yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Total Asset Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank syariah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan, yaitu Pembiayaan yang disalurkan, dan Pertumbuhan Aset. Objek penelitian yang digunakan Bank Umum Syariah dan juga Unit Usaha Syariah. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu metode analisis deskriptif dan analisis time series. Persamaan dari Penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan yaitu Total Aset.
6. Penelitian yang dilakukan El Ayyubi (2018) yang berjudul “Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Hasil penelitian diperoleh adalah adanya bidirectional causality antara pembiayaan syariah dan GDP. Pada hasil estimasi VECM menunjukkan

adanya pengaruh signifikan antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi. kesamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan pada peneliti yaitu DPK, dan total aset. Juga untuk metode pada penelitian menggunakan VAR. namun pada penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu peneliti menggunakan periode 2019-2023.

7. Penelitian yang dilakukan Azwar Rakhman (2020) yang berjudul “pengaruh dana DPK, NPF dan FDR terhadap total aset perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara bersama-sama dana pihak ketiga, NPF dan FDR berpengaruh terhadap total aset. Dan secara individu DPK berpengaruh terhadap total aset. kesamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan pada peneliti yaitu DPK, dan total aset. Juga untuk metode pada penelitian menggunakan Vecm. namun pada penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu peneliti menggunakan periode 2019-2023 dan fokus mengukur hubungan jangka pendek dan jangka Panjang tiap variabel secara parsial menggunakan metode Vecm.
8. Penelitian yang dilakukan Nasiha (2019) yang berjudul “pengaruh DPK, total aset, dan pembiayaan yang diberikan (PYD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 2013-2017” kesamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan pada peneliti yaitu DPK, dan total aset. Juga untuk metode pada penelitian menggunakan VAR. namun pada penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu peneliti menggunakan periode 2019-2023 dan fokus mengukur hubungan jangka pendek dan jangka Panjang tiap variabel secara parsial menggunakan metode Vecm.
9. Penelitian yang dilakukan Emy Widyastuti & Nena Arianta (2020) yang berjudul “Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Bagaimana Kontribusinya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka Panjang variabel pembiayaan konsumsi berpengaruh negative signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. kesamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan pada peneliti yaitu DPK, dan total aset. Juga untuk metode pada

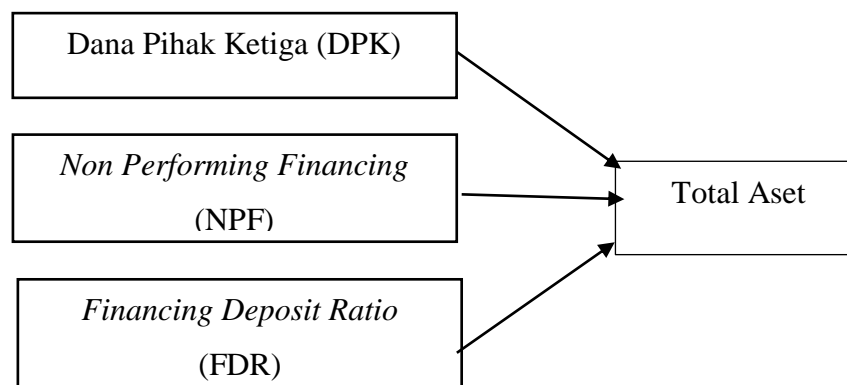
penelitian menggunakan VAR. namun pada penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu peneliti menggunakan periode 2019-2023 dan fokus mengukur hubungan jangka pendek dan jangka Panjang tiap variabel secara parsial menggunakan metode Vecm.

10. Penelitian yang dilakukan R. O. Putra (2018) yang berjudul “Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan variabel total asset, pembiayaan, dan DPK dapat menjelaskan 96% dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesamaan pada penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan yaitu DPK. Namun pada penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu metode penelitian yang digunakan.
11. Penelitian yang dilakukan oleh Diana dan Asa (2016) yang berjudul “Pengaruh Total DPK, FDR, NPF dan ROA terhadap Total Aset Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel DPK, FDR, ROA, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap total aset bank syariah. Secara parsial, hanya DPK, FDR, dan NPF yang berpengaruh signifikan, sedangkan ROA tidak berpengaruh. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu DPK, FDR dan NPF. Namun pada penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu peneliti menggunakan metode VAR/VECM dan menggunakan periode 2019-2023.
12. Penelitian yang dilakukan oleh Aisy (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2006-2015”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor internal. Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan pada penelitian yaitu DPK, FDR dan NPF. Juga untuk metode pada penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu peneliti menggunakan periode 2019-2023 dan fokus mengukur jangka pendek dan jangka Panjang tiap variabel secara parsial menggunakan metode VAR/VECM

13. Penelitian yang dilakukan oleh Fadlan (2016) yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia. Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel Total Aset. Namun dalam penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu peneliti menggunakan periode 2019-2023 dan menggunakan metode VECM.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah konseptual yang membahas bagaimana sebuah teori berhubungan dengan factor-faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang signifikan. Kerangka konseptual ini juga secara tentative menjelaskan hubungan antara masalah atau objek yang diteliti.



Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka hipotesis yang dikembangkan sebagai berikut:

H_{01} : Tidak terdapat hubungan DPK dengan total asset bank umum Syariah jangka pendek dan jangka Panjang

H_{a1} : Terdapat hubungan DPK dengan total asset bank umum Syariah jangka pendek dan jangka Panjang

H_{02} : Tidak terdapat hubungan FDR dengan total asset bank umum Syariah jangka pendek dan jangka Panjang

H_{a2} : Terdapat hubungan FDR dengan total asset bank umum Syariah jangka pendek dan jangka Panjang

H_{03} : Tidak terdapat hubungan NPF dengan total asset bank umum Syariah jangka pendek dan jangka Panjang

H_{a3} : Terdapat hubungan NPF dengan total asset bank umum Syariah jangka pendek dan jangka Panjang

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah melalui pendekatan kuantitatif, dimana menekankan kepada analisis pada data-data *numeric* (angka) yang diolah dengan statistika. Dalam pendekatan kuantitatif ini, memakai tata cara korelasi buat mengenali ikatan antara variabel yang diteliti lewat pengujian hipotesis sehingga memperoleh pengujian yang pas dalam menarik kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia, dengan mengambil data-data DPK, FDR, NPF dan Aset yang diperlukan melalui situs resmi Ojk..

Waktu penelitian penulis dimulai pada saat penulis mengajukan riset proposal skripsi untuk melakukan penelitian ini :

Tabel 3. 1
Schedule penelitian

Uraian Kegiatan	Oktober 2024	November 2024	Desember 2024	Januari 2025	Februari 2025
Penyusunan Proposal					
Pembuatan Proposal					
Bimbingan Proposal					
Seminar Proposal					
Penelitian					
bimbingan Skripsi					
Munaqasah					

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik dokumentasi. Data dikumpulkan melalui peneliti pegabila dokumen-dokumen Bank Umum Syariah dan laporan kinerja Bank Umum Syariah dari tahun 2019-2023, beserta data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang spesifikasinya sistematis, terstruktur, dan terencana dengan jelas dari awal hingga pembuatan desain penelitian. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengembangkan serta menggunakan sistem atau model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena dan hubungannya, didukung dengan penggunaan angka sebagai proses pengumpulan data, penafsiran terhadap data, hingga didapatkannya hasil dari analisis data (Sugiyono, 2017).

Pada Tahap awal penting untuk mengolah data terlebih dahulu kemudian pada tahap berikutnya masuk tahap uji. Uji pertama pada metode VAR adalah uji stationer. Apabila data stationer pada tingkat level maka penelitian selanjutnya akan menggunakan model *Vector Autoregression* (VAR). Apabila data tidak stationer pada tingkat level atau stationer pada difference maka penelitian selanjutnya menggunakan model *Vector Error Correction Model* (VECM). Baik sebelum masuk kedalam model VAR atau VECM uji yang dilakukan sama dari uji stationer, lag optimum, Uji stabilitas VAR, uji kointegrasi, Uji Kausalitas Granger, Estimasi VECM dan IRF. Namun sebelum masuk pada model VECM harus melakukan uji kointegrasi. Apabila data terkointegrasi maka model yang dilakukan adalah VECM. Namun apabila data tidak terkointegrasi maka menggunakan model VAR difference. Kemudian setelah melakukan kedua modal tersebut maka akan masuk pada tahap *Impluse Response Function* (IRF) untuk melihat pengaruh dari variable independent terhadap variable dependent (Basuki dan Prawoto, 2017). Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah

Vector Error Correction Model (VECM) dengan menggunakan alat analisis EViews 12. *Vector Error Correction Model* adalah turunan model *Vector Autoregressive* (VAR) yang dibatasi pada data variabel non stasioner yang diketahui memiliki kointegrasi atau kemungkinan dampak jangka panjang. Berbeda dengan VAR, VECM harus stasioner pada diferensiasi pertama dan semua variabel harus memiliki stasioner yang sama, yaitu terdiferensiasi pada turunan pertama. Secara umum, untuk menggunakan model VECM, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, dimulai dengan uji stasioner data, dan kemudian uji Kointegrasi, uji lag optimal, uji stabilitas VAR / VECM, Uji kausalitas Granger, dan estimasi VECM dan IRF. Untuk penjelasan secara parsial dan spesifik akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Stasioner

Untuk dapat melakukan uji stasioner data, maka digunakan metode uji *Augmented Dicky Fuller* (ADF) dengan memakai taraf nyata sebesar 5%. Data dapat dikatakan stasioner (tidak mengandung akar unit) apabila dalam pengujiannya dihasilkan nilai t-ADF lebih kecil dari nilai kritis MacKinnon. Pengujian akar-akar unit ini dilakukan pada tingkat level sampai dengan *first difference*. Proses difference ini akan mengubah data tidak stasioner menjadi data stasioner dan mempunyai rata-rata serta varians konstan antar periodenya. (Basuki dan Prawoto, 2016).

2. Uji Lag Optimal

Untuk memperoleh estimasi model VAR, langkah yang terlebih dahulu dilakukan adalah menentukan nilai lag optimal yang digunakan dalam estimasi VAR. Uji pada panjang lag optimal ini selain berfungsi menunjukkan lamanya reaksi satu variabel satu terhadap variabel lain, uji ini juga berfungsi untuk menghapus masalah autokorelasi dalam sistem VAR yang umumnya digunakan sebagai alat analisis stabilitas VAR. Panjang lag optimal akan diuji dengan memakai kriteria informasi yang telah tersedia. Kandidat lag yang terpilih adalah panjang lag menurut kriteria *Likelihood Ratio* (LR), *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike*

Information Criterion (AIC), *Schwarz Information Criterion (SC)*, dan *Hannan-Quinn Criterion (HQ)*. (Basuki dan Prawoto, 2016).

3. Uji Stabilitas Var

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, kestabilan nilai VAR harus diuji terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan apabila hasil estimasi VAR yang nantinya dikombinasikan dengan model *Error Correction* tidak stabil, maka analisis *Impulse Response Function dan Variance Decomposition* akan bersifat tidak valid. Suatu sistem VAR dikatakan stabil apabila hasil pengujiannya menghasilkan keseluruhan akar atau root-nya mempunyai nilai modulus lebih kecil dari satu (Basuki dan Prawoto, 2016).

Untuk memperoleh estimasi model VAR, langkah yang terlebih dahulu dilakukan adalah menentukan nilai lag optimal yang digunakan dalam estimasi VAR. Uji pada panjang lag optimal ini selain berfungsi menunjukkan lamanya reaksi satu variabel satu terhadap variabel lain, uji ini juga berfungsi untuk menghapus masalah autokorelasi dalam sistem VAR yang umumnya digunakan sebagai alat analisis stabilitas VAR. Panjang lag optimal akan diuji dengan memakai kriteria informasi yang telah tersedia. Kandidat lag yang terpilih adalah panjang lag menurut kriteria *Likelihood Ratio (LR)*, *Final Prediction Error (FPE)*, *Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwarz Information Criterion (SC)*, dan *Hannan-Quinn Criterion (HQ)*. (Basuki dan Prawoto, 2016).

4. Uji Kointegrasi

Kehadiran variabel non-stasioner dapat menyebabkan kemungkinan besar terdapatnya hubungan jangka panjang antara variabel yang digunakan dalam sistem. Uji kointegrasi ini dilakukan guna mengetahui keberadaan hubungan antar variabel, khususnya dalam periode jangka panjang. Jika diketahui adanya kointegrasi pada variabel-variabel yang digunakan dalam model, maka dapat dipastikan terdapat hubungan jangka panjang antar variabel. Hal tersebut dapat dilihat apabila terdapat sejumlah variabel yang bergerak bersama pada jangka panjang dengan

orde yang sama. Metode yang dapat digunakan untuk menguji keberadaan dari kointegrasi ini adalah metode Johansen Cointegration test. (Basuki dan Prawoto, 2016).

Untuk memperoleh informasi jangka panjang, diperlukan penentuan terlebih dahulu mengenai rank kointegrasi sehingga dapat diketahui berapa sistem persamaan yang mampu menerangkan keseluruhan sistem yang telah ada. Kriteria pengujian kointegrasi didasarkan pada trace statistic. Apabila nilai trace statistic lebih besar daripada nilai critical value 5%, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima sehingga dapat diketahui jumlah persamaan terkointegrasi dalam sistem. Jika terbukti adanya kointegrasi, maka tahapan dari VECM dapat dilanjutkan. Namun, apabila tidak terdapat kointegrasi, maka VECM tidak dapat dilanjutkan.

5. Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas Granger (*Granger Causality Test*) digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan timbal balik atau tidak. Artinya, secara signifikan apakah satu variabel mempunyai hubungan sebab akibat dengan variabel lainnya. Uji kausalitas granger digunakan untuk memprediksi hubungan antara kedua variabel berdasarkan data time series dalam estimasi model. Uji kausalitas bivariate pada penelitian ini menggunakan *VAR Pairwise Granger Causality Test* dan menggunakan taraf nyata lima persen (Basuki dan Prawoto, 2016).

6. Estimasi VECM

Proses selanjutnya setelah mengetahui terdapatnya kintegrasi adalah dilakukannya uji dengan menggunakan metode *error correction*. Apabila terdapat perbedaan derajat integrase antar variabel uji, maka pengujian akan dilakukan bersamaan (*jointly*) antara persamaan *error correction* dengan persamaan jangka Panjang, setelah diketahui terjadi kointegrasi dalam variabel. Perbedaan yang terdapat pada derajat integrase variabel yang terkointegrasi diketahui sebagai multi cointegrasi. Namun apabila tidak terdapat kointegrasi, maka pengujian menggunakan variabel

first difference. VECM adalah bentuk VAR yang terstriksi karena keberadaan bentuk data terkointegrasi dan tidak stationer. VECM sering disebut sebagai desain VAR bagi *series non stationer* yang memiliki hubungan kintegrasi. Spesifikasi VECM merestriksi hubungan jangka Panjang variabel-variabel endogen agar konvergen kedalam hubungan kointegrasinya, namun tetap membiarkan keberadaan dinamisasi jangka pendek (Basuki dan Prawoto, 2016).

7. *Impluse Response Function (IRF)*

Impulse Response Function (IRF) adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan suatu variable endogen terhadap suatu *shock* tertentu. Hal ini dikarenakan *shock* variable-*i* tidak hanya berpengaruh terhadap variable-*i* itu saja tetapi ditransmisikan kepada semua variable endogen lainnya melalui struktur dinamis atau struktur *lag* dalam VECM (Ichsan dan Akhiroh, 2017). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu kejutan/guncangan (*shock*) pada satu variable endogen sehingga dapat menentukan bagaimana suatu perubahan yang tidak diharapkan dalam variable mempengaruhi variable lain.

IRF memperlihatkan respon dinamis jangka Panjang pada setiap variable akibat adanya *shock* tertentu pada setiap persamaan. Sumbu horizontal menggambarkan waktu dalam periode hari ke depan setelah terjadinya *shock* sedangkan sumber vertical merupakan nilai respon. Secara mendasar, dalam analisis ini akan diketahui suatu variable memiliki respon yang positif atau negative terhadap variable lainnya. Respon tersebut dalam jangka pendek biasanya cukup signifikan dan cenderung berubah, sedangkan dalam jangka Panjang responsnya cenderung konsisten dan terus mengecil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah Indonesia

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperbolehkan adalah Perseroan Terbatas/PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004); dengan modal disetor paling sedikit satu triliun rupiah (Pasal 4 PBI No.7/35/PBI/2005). Sementara itu dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bentuk hukum yang diperbolehkan hanyalah Perseroan Terbatas.

Bank Syariah pertama di Indonesia menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yakni dengan terbentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akta pendirian ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Sejak 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi. Selanjutnya juga lahir bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Pendirian Bank Syariah Mandiri adalah sebuah pertarungan bankir syariah. Jika BSM sukses maka akan menjadi bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya kalau BSM gagal, itu besar tidak menutup kemungkinan bank syariah di Indonesia akan bangkrut. Masalah ini karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh bank milik negara yang dimiliki oleh pemerintah. Ternyata BSM itu cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri menyusul dengan berdirinya beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Setelah berdirinya beberapa bank syariah atau unit usaha syariah, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan perbankan syariah sejak tahun 1998, yang memberikan peluang luas bagi bank syariah untuk berkembang. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut dunia usaha. Bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Lailatuniar Suci,2017).

Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan per Januari 2021 terdiri dari 14 bank dan 20 Unit Usaha Syariah. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi pengembangan yang berkesinambungan dan bertahap sesuai dengan prinsip syariah. Fase pertama dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri. Tahap kedua memasuki fase penguatan struktur industri perbankan syariah. Tahap ketiga perbankan syariah ditujukan untuk memenuhi standar keuangan internasional dan kualitas layanan. Sedangkan tahap keempat dimulai dari integrasi lembaga keuangan syariah (Peggi, 2017).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia berpotensi menjadi pemimpin industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hal halal dan kuatnya dukungan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mengembangkan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk Bank Syariah. Bank Syariah berperan penting sebagai fasilitator dalam seluruh kegiatan perekonomian dalam ekosistem industri halal. Eksistensi industri perbankan syariah di Indonesia sendiri mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan dalam tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat akselerasi juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tak terkecuali bank syariah milik bank milik negara yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menandai sejarah

penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu kesatuan yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menggabungkan keunggulan ketiga Bank Syariah untuk memberikan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan induk perusahaan (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong mampu bersaing ditingkat global. (BSI, 2023).

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Hery Gunardi dalam laporannya menyampaikan, integrasi dan peningkatan nilai Bank Syariah Himbara dimulai pada awal Maret 2020, memakan waktu sekitar 11 bulan. Selama kurun waktu tersebut, lanjut Hery, seluruh proses dan rangkaian seperti penandatanganan akta merger, penyampaian keterbukaan informasi, hingga perolehan izin dari OJK telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan (Rosi dan Dewi 2021).

1. Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Pada 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan keuangan syariah, 2019 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di antaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah. Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR3/PB.1/2021, dan 1 Februari 2021, Presiden

Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan Bank Syariah kebanggaan masyarakat yang diharapkan dapat menjadi energi baru bagi pembangunan perekonomian nasional dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga mencerminkan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi seluruh alam.

Salah satu visi yang diusung BSI adalah menjadi bank syariah berskala dunia, yakni target masuk dalam peringkat 10 besar bank syariah dunia dengan nilai kapitalisasi besar pada tahun 2025. Pencapaian target tersebut menjadi tantangan besar karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah, termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) per November 2020, hanya 3,97% dari total aset bank umum. Selain itu, nilai pembiayaan BUS dan UUS Syariah hanya 2,49% dari total pembiayaan bank umum. Tingkat inklusi keuangan syariah pada tahun 2019 juga turun 200 bps dari 11,1% pada tahun 2016 menjadi hanya 9,10%. Sebaliknya, tingkat inklusi keuangan pada perbankan konvensional justru meningkat dari 65,6% pada tahun 2016 menjadi 75,28% pada tahun 2019. (Achmad Sani 2021).

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah Bank Umum Syariah di Indonesia, yang pada bulan Februari 2017 sampai desember 2023. Dimana dana pihak ketiga, pembiayaan, risiko dan asset suatu variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan asset Bank Umum Syariah Di Indonesia.

2. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK dilatar belakangi karena kebutuhan penataan kembali lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut

kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun

1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010) (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia)

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang memakai tata cara korelasi buat mengenali ikatan antara variabel yang diteliti lewat pengujian hipotesis sehingga memperoleh pengujian yang pas dalam menarik Kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *Vector Error Correction Model* (VECM) dengan menggunakan alat analisis *Eviews 12*. *Vector Error Correction Model* adalah turunan model *Vector Autoregressive* (VAR) yang dibatasi pada data variabel non stationer yang diketahui memiliki kointegrasi atau kemungkinan dampak jangka Panjang dan pendek.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Stationer (*Root Test*)

Pengujian VECM memiliki tahapan yang disebut uji akar unit (*Root test*) sebelum menguji hasil estimasi. Uji-Root bertujuan untuk menganalisis apakah data panel stasioner. Stasioneritas merupakan persyaratan penting ketika berhadapan dengan data panel. Teknik analisis model koreksi kesalahan mensyaratkan bahwa variabel yang digunakan harus tidak stasioner pada tingkat level. Jika data yang diuji tidak stasioner pada tingkat level, maka kita perlu melanjutkan ke tahap pengujian

integrasi berikutnya, di mana pengujian dijalankan hingga semua variabel dalam data harus stasioner pada tingkat first difference. Uji akar unit dalam penelitian ini menggunakan uji Dickey Fuller (ADF), dengan ketentuan variabel dinyatakan tidak stasioner jika probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikansi (0,05), Apabila probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05) maka variabel dinyatakan stasioner.

Tabel 4. 1
Hasil Uji Stationer Pada Tingkat Level

Variabel	ADF (Level)		Ket
	ADF	Prob	
DPK	0.057553	0.9597	Tidak stationer
NPF	0.079724	0.9615	Tidak stationer
FDR	-1.559051	0.4967	Tidak stationer
ASET	0.464650	0.9641	Tidak stationer

Sumber: Data Diolah Dengan Eviews12 (Lampiran 3)

Uji stationer pada tingkat level menunjukkan semua variabel tidak stationer dikarenakan nilai signifikan lebih dari 0.05 (Basuki dan Prawoto, 2016). Apabila data tidak stationer pada tingkat level. Maka perlu melakukan ADF *test* pada tingkat *first difference* (Mahyus, 2015).

Tabel 4. 2
Hasil Uji Stationer Pada Tingkat First Difference

variabel	ADF (1 st Difference)		Ket
	Adj. t-stat	Prob	
DPK	-8.608592	0.0000	Stationer
NPF	-8.425007	0.0000	Stationer
FDR	-6.710615	0.0000	Stationer
ASET	-8.945308	0.0000	stationer

Sumber: Data Diolah Dengan Eviews12 (Lampiran 4)

Pada ADF test ditingkat *first difference* yang menunjukkan nilai signifikan semua variabel yang digunakan kurang 0.05 yang berarti hasil uji ADF pada tingkat *first difference* stationer (Basuki dan Prawoto, 2017). Jadi semua data yang digunakan adalah stationer selama pengujian

dengan metode uji *Augmented Dickey-Fuller test* yang ditingkatkan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya apabila data stasioner maka analisis kedepan dapat menggunakan VAR dan VECM (apabila data terkointegrasi).

Berdasarkan dari hasil tabel 4.2 uji stasioneritas pada tingkat *first difference* yang dilakukan dengan menggunakan uji *Augmented Dickey Fuller* untuk variabel DPK, NPF, FDR dan Aset stasioner pada tingkat *first difference* karena memiliki dengan nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$ maka dinyatakan bahwa variabel DPK, NPF, FDR dan Aset sudah stasioner atau dengan kata lain bahwa data yang digunakan sudah tepat untuk mengestimasi model penelitian yang digunakan.

2. Uji Uji Lag Optimal

Peramalan dengan VAR mengharuskan data menjadi stasioner. Karena data untuk masing-masing variabel stasioner pada tingkat *first difference*, sehingga perkiraan tersebut diharapkan dapat memberikan hasil model yang valid. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian juga dapat memiliki tingkat validitas yang tinggi. Peramalan model VAR dimulai dari menentukan panjang lag yang tepat pada model VAR. Penentuan panjang lag yang optimal harus dilakukan dalam pemodelan VAR. Apabila lag optimal yang dimasukkan terlalu pendek, dikhawatirkan tidak dapat menjelaskan dinamika model secara utuh. Namun, jika lag optimal dimasukkan terlalu panjang, hal ini bisa menyebabkan peramalan yang tidak efisien karena derajat 80 kebebasan yang terbatas, terutama untuk model dengan sampel kecil. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui lag optimal sebelum melakukan estimasi VAR. Pendekatan VAR amat berpengaruh terhadap panjang lag data yang dipakai, sebab penentuan panjang lag digunakan untuk menganalisa durasi periode pengaruh suatu variabel terhadap variabel periode sebelumnya ataupun terhadap variabel dependen lainnya. Pada penelitian ini menentukan panjang lag (p) model menggunakan AIC (Akaike Information Critrion), FPE (Final Prediction Error), HQ (Hannan-Quin Criterion) dan SC

(Schwarz Information Criterion) dengan nilai p didapatkan melalui pemilihan p yang minimum.

Tabel 4.3
Hasil Uji Lag Optimal

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-161.6076	NA	0.007773	6.494415	6.645931	6.552314
1	49.96326	381.6572	3.64e-06	-1.175030	-0.4174511*	-0.885537*
2	67.24735	28.46792*	3.50e-06*	-1.225386*	0.138255	-0.704299
3	81.70416	21.543747	3.84e-06	-1.164869	0.804836	-0.412186
4	93.55745	15.80439	4.80e-06	-1.002253	1.573515	-0.017976

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Sumber: Data Diolah Dengan Eviews 12 (Lampiran 5)

Berdasarkan tabel 4.6 dengan penentuan durasi interval optimal atau durasi delay optimal dengan berbagai kriteria yang ada seperti sequential modified LR test statistic (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz information criterion (SC) dan Hannan-Quinn Criterion (HQ) untuk menentukan durasi lag optimal terjadi 1 ketika nilai-nilai kriteria di atas memiliki nilai absolut terkecil. Dari hasil tabel di atas, panjang lag optimal dapat ditentukan dengan nilai absolut terkecil, yang ditandai dengan jumlah bintang pada periode tersebut. Dengan lag 1 jumlah bintang hanya 2 dan dengan lag 2 ada 3

bintang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa panjang delay yang optimal adalah 2.

3. Uji Stabilitas VAR

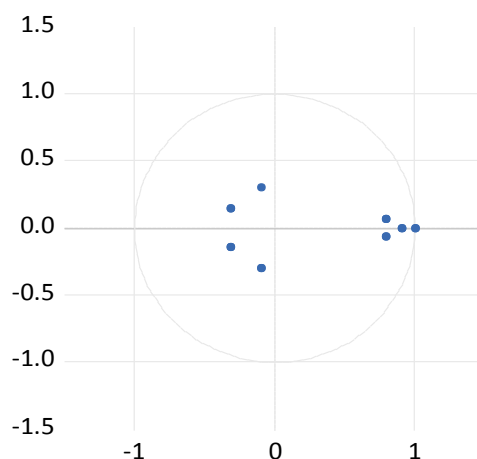
Jika dari hasil pengujian menunjukkan roots memiliki modulus yang lebih kecil dari 1, maka model tersebut dapat dikatakan stabil. Sebaliknya jika roots memiliki modulus yang lebih besar dari 1, maka model VAR tidak stabil. Hasil Uji stabilitas VAR adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Stabilitas VAR

Root	Modulus
0.005311	0.005311
0.914252	0.914252
0.801028 – 0.066956i	0.803822
0.801028 + 0.066956i	0.803822
-0.306627 – 0.142832i	0.338262
-0.306627 + 0.142832i	0.338262
-0.091960 – 0.300603i	0.314355
-0.091960 + 0.300603i	0.314355

Sumber: Data Diolah Dengan Eviews 12 (Lampiran 6)

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial



Gambar 4. 1
Hasil Uji Stabilitas VAR

Hasil pengujian stabilitas VAR pada tabel 4.4 dan gambar 4.2, menunjukkan bahwa tidak ada akar unit yang terlihat dari tabel maupun gambar pada tabel 4.4 dan gambar 4.2. Dimana tabel memiliki modulus lebih kecil dari 1, dan hal tersebut juga didukung dari gambar yang ada di atas dari gambar titik invers roots of AR Characteristic polynominal yang kesemua variabel berada dalam lingkaran. Berarti sudah jelas bahwa variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pengujian model VAR sudah stabil atau sudah stasioner.

4. Uji Kointegrasi

Setelah melakukan uji stasioner, langkah selanjutnya adalah uji kointegrasi. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki apakah terdapat kointegrasi dalam data variabel yang menunjukkan hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. Uji kointegrasi pada penelitian ini menggunakan metode uji Johansen Cointegration Test.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Kointegrasi
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized		Trace	0.05	
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None*	0.554381	109.1721	47.85613	0.0000
At most 1*	0.447048	66.33268	29.79707	0.0000
At most 2*	0.351124	34.93103	15.49471	0.0000
At most 3*	0.202730	12.00780	3.841465	0.0005

Sumber: Data Diolah Dengan Eviews 12 (Lampiran 7)

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji Johansen Cointegration Test dapat diketahui bahwa terdapat kointegrasi dengan nilai Trace Statistic > Critical Value (0.05) atau $109.1721 > 47.85613$. Jadi, dapat disimpulkan data tersebut terkointegrasi karena memenuhi kedua kriteria yaitu nilai Trace Statistic lebih besar dari Critical Value dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 pada semua tingkat pengujian. Hal ini berarti bahwa dalam

jangka panjang terdapat kointegrasi di dalam model persamaan, maka tahapan dari VECM dapat dilanjutkan.

5. Uji Kausalitas Granger

Tahap selanjutnya adalah melakukan uji kausalitas Granger (Granger Causality Test) untuk menganalisis apakah terjadi hubungan timbal balik atau tidak pada setiap variabel. Bisa dikatakan bahwa, apakah terdapat hubungan sebab akibat atau tidak antara indikator variabel satu dengan yang lainnya, sebab setiap variabel dalam penelitian mempunyai kesempatan untuk menjadi variabel terikat maupun bebas. Uji kausalitas pada penelitian ini menggunakan VAR Pairwise Granger Causality Test dan menggunakan taraf nyata 5% dengan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas > 0.05 maka, tidak terdapat hubungan kausalitas (H_0 di tolak)
- b. Jika nilai probabilitas < 0.05 maka, terdapat hubungan kausalitas (H_0 di terima)

Tabel 4. 6
Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis	OBS	F-Statistic	Prob
ASET does not Granger Cause DPK	36	1.66370	0.0874
DPK does not Granger Cause ASET		5.28876	0.0291
ASET does not Granger Cause NPF	36	1.42089	0.0539
NPF does not Granger Cause ASET		5.64080	0.0380
ASET does not Granger Cause FDR	36	0.53771	0.0094
FDR does not Granger Cause ASET		6.70852	0.0440

Sumber: Data Diolah Dengan Eviews 12 (Lampiran 8)

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui terdapat hubungan antara variabel Aset dan DPK. Hal ini karena variabel Aset terhadap DPK memiliki nilai Probabilitas lebih besar dari 0.05 ($0.0874 > 0.05$). sedangkan probabilitas variabel DPK terhadap Aset lebih kecil dari 0.05 ($0.0291 < 0.05$). Sehingga hipotesis H_01 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan kausalitas antara DPK dan Aset.

Selanjutnya, diketahui terdapat hubungan antara variabel Aset dan NPF. Hal ini karena variabel Aset terhadap NPF memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 ($0.0539 < 0.05$). dan nilai probabilitas NPF terhadap Aset lebih kecil dari 0.05 ($0.0380 < 0.05$). sehingga hipotesis H_02 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan kausalitas antara NPF dan Aset

Kemudian, terdapat hubungan antara variabel Aset dan FDR. Hal ini karena variabel Aset terhadap FDR memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 ($0.0094 < 0.05$). dan nilai probabilitas variabel FDR terhadap Aset lebih kecil dari 0.05 ($0.0440 < 0.05$). sehingga hipotesis H_03 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan kausalitas antara FDR dan Aset.

6. Uji Estimasi VECM

Setelah melakukan serangkaian tahap pra estimasi, yaitu uji stasioneritas data, uji kointegrasi, penentuan panjang lag, dan stabilitas VECM, dan faktanya terdapat tiga rank kointegrasi dalam taraf uji 0.05 dalam penelitian ini, maka model analisis yang digunakan, yaitu VECM (*Vector Error Correction Model*). Penggunaan estimasi VECM sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil estimasi VECM dapat ditunjukkan dalam tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Hasil Uji Estimasi VECM

Jangka Pendek			
Variabel	Keofisien	T-Statistik	T-Tabel
D(DPK(-3))	0.440	1.763	1.663
D(NPF(-3))	0.110	1.726	
D(FDR(-3))	0.355	2.014	
Jangka Panjang			
(DPK(-1))	0.666	2.652	
(NPF(-1))	0.701	2.122	
(FDR(-1))	0.399	2.566	
R-Square	0.553		

Y: Asset

Sumber: Data Diolah Dengan Eviews 12 (Lampiran 9)

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji estimasi VECM jangka pendek dan jangka panjang sebagai berikut:

- a. Hubungan DPK dengan total asset bank umum Syariah jangka pendek

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji estimasi VECM jangka pendek menunjukkan adanya hubungan DPK terhadap total asset bank umum Syariah jangka pendek dengan nilai t-statistik sebesar $1.763 > 1.663$ dengan nilai koefisien sebesar 0.440 dan bertanda positif artinya apabila terjadi kenaikan DPK satu poin maka akan meningkatkan asset pada jangka pendek sebesar 44.0%.

- b. Hubungan NPF dengan total asset bank umum Syariah jangka pendek

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji estimasi VECM jangka pendek menunjukkan adanya hubungan NPF terhadap total aset bank umum Syariah jangka pendek dengan nilai t-statistik sebesar $1.726 > 1.663$ dengan nilai koefisien sebesar 0.110 dan bertanda positif artinya apabila terjadi kenaikan NPF satu poin maka akan meningkatkan asset pada jangka pendek sebesar 11.0%.

c. Hubungan FDR dengan total aset bank umum Syariah jangka pendek

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji estimasi VECM jangka pendek menunjukkan adanya hubungan NPF terhadap total aset bank umum Syariah jangka pendek dengan nilai t-statistik sebesar $2.014 > 1.663$ dengan nilai koefisien sebesar 0.355 dan bertanda positif artinya apabila terjadi kenaikan NPF satu poin maka akan meningkatkan aset pada jangka pendek sebesar 35.5%.

d. Hubungan DPK dengan total aset bank umum Syariah jangka panjang

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji estimasi VECM jangka panjang menunjukkan adanya hubungan DPK terhadap total aset bank umum Syariah jangka panjang dengan nilai t-statistik sebesar $2.652 > 1.663$ dengan nilai koefisien sebesar 0.666 dan bertanda positif artinya apabila terjadi kenaikan DPK satu poin maka akan meningkatkan aset pada jangka panjang sebesar 66.6%.

e. Hubungan NPF dengan total aset bank umum Syariah jangka panjang

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji estimasi VECM jangka panjang menunjukkan adanya hubungan NPF terhadap total aset bank umum Syariah jangka panjang dengan nilai t-statistik sebesar $2.122 > 1.663$ dengan nilai koefisien sebesar 0.701 dan bertanda positif artinya apabila terjadi kenaikan FDR satu poin maka akan meningkatkan aset pada jangka panjang sebesar 70.1%.

f. Hubungan FDR dengan total aset bank umum Syariah jangka panjang

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji estimasi VECM jangka panjang menunjukkan adanya hubungan NPF terhadap total aset bank umum Syariah jangka panjang dengan nilai t-statistik sebesar $2.566 > 1.663$ dengan nilai koefisien sebesar 0.399 dan bertanda positif artinya apabila terjadi kenaikan NPF satu poin maka akan meningkatkan aset pada jangka panjang sebesar 39.9%.

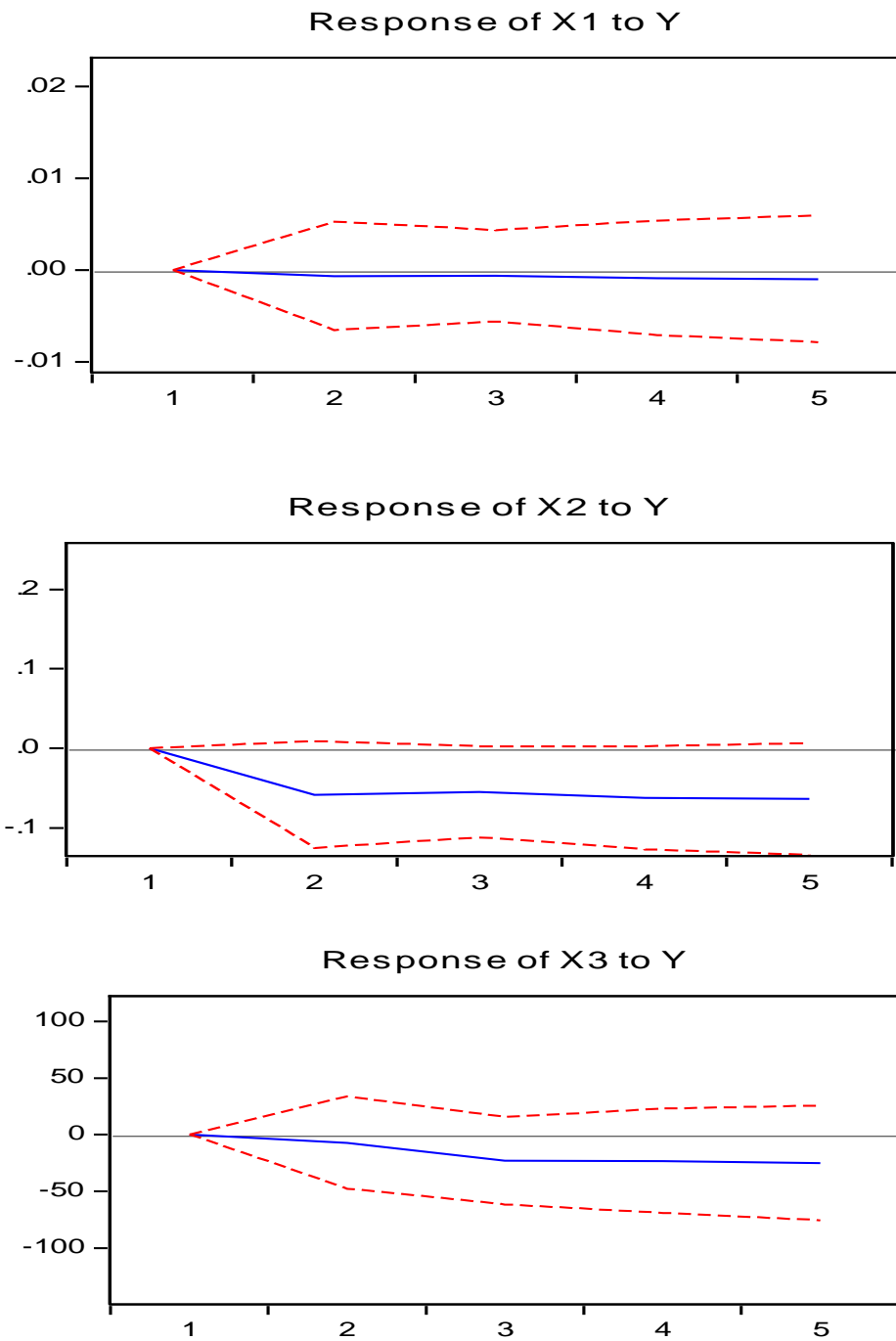
Hasil estimasi VECM dalam jangka pendek dan jangka panjang pada tabel 4.9 dikatakan hasil yang valid, karena diketahui dari nilai koefisien determinasi R-squared sebesar 0.553 atau 55.3% yang dimana

perubahan variabel dependen (asset) mampu dijelaskan oleh variabel independen (DPK, FDR dan NPF) sebesar 55.3 persen dari maksimal 100 persen, sedangkan 44.7 persen lainnya dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

7. Uji *Impulse Response Function* (IRF)

Impulse Response Function (IRF) adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan suatu variabel endogen terhadap suatu *shock* tertentu. Hal ini dikarenakan *shock* variable-*i* tidak hanya berpengaruh terhadap variable-*i* itu saja tetapi ditransmisikan kepada semua variabel endogen lainnya melalui struktur dinamis atau struktur *lag* dalam VECM (Ichsan dan Akhiroh, 2017). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu kejutan/guncangan (*shock*) pada satu variabel endogen sehingga dapat menentukan bagaimana suatu perubahan yang tidak diharapkan dalam variabel mempengaruhi variabel lain.

IRF memperlihatkan respon dinamis jangka Panjang pada setiap variabel akibat adanya *shock* tertentu pada setiap persamaan. Sumbu horizontal menggambarkan waktu dalam periode hari ke depan setelah terjadinya *shock* sedangkan sumbu vertikal merupakan nilai respon. Secara mendasar, dalam analisis ini akan diketahui suatu variabel memiliki respon yang positif atau negatif terhadap variabel lainnya. Respon tersebut dalam jangka pendek biasanya cukup signifikan dan cenderung berubah, sedangkan dalam jangka Panjang responsnya cenderung konsisten dan terus mengecil.



Gambar 4.2
Hasil Uji Impulse Response Function (IRF)
Sumber: Data Diolah Dengan Eviews 12 (Lampiran 10)

Berdasarkan dari gambar 4.2 dalam bentuk grafik menunjukkan bahwa DPK, FDR dan NPF pada periode pertama mengalami naik sedikit, pada periode ke-dua mengalami penurunan, periode ke-tiga sampai dengan

ke-lima mengalami penurunan ini menunjukkan bahwa DPK, FDR dan NPF memiliki dampak jangka pendek yang mengurangi asset tetapi dampaknya melemah seiring waktu artinya jika IRF menunjukkan penurunan yang besar pada beberapa periode pertama sampai dengan lima ini bisa menunjukkan bahwa dampak shock sangat tajam dan membutuhkan waktu untuk kembali ke titik ekuilibrium (nilai normal). Jika respons negatif bertahan lama atau hanya sedikit pemulihan, maka dampaknya dapat dianggap permanen atau jangka panjang.

C. Pembahasan

Hasil penelitian ini merupakan pengujian dari “Analisis Interaksi DPK, Pembiayaan, Risiko Dan Aset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pendekatan Vector Error Correction Model (VECM)”. Setelah dilakukan pengujian dengan pengujian stationer, kointegrasi, lag optimal, stabilitas VAR, kausalitas granger, estimasi vecm dan *impulse response function* (IRF) maka akan ditelaah lebih lanjut mengenai hubungan masing-masing variabel dengan sebagai berikut:

1. Hubungan DPK terhadap Aset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pendekatan Vector Error Correction Model (VECM)

Dalam Teori Intermediasi keuangan yang dikembangkan oleh Frederich S. Mishkin, menyatakan bahwa ketika DPK meningkat, bank memiliki lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk membiayai aset, seperti pinjaman dan investasi. Peningkatan DPK menunjukkan bahwa bank berhasil menarik lebih banyak simpanan dari masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk memperluas portofolio aset mereka. Dengan kata lain, semakin besar DPK yang dimiliki bank, semakin besar pula kemampuannya untuk meningkatkan asetnya. (Mishkin, 2016).

Berdasarkan hasil pengujian estimasi VECM menunjukkan bahwa terdapat hubungan DPK dengan aset pada Bank Umum Syariah jangka pendek dengan nilai T statistic sebesar $1.763 > 1.663$ dan jangka panjang dengan nilai T statistic $2.652 > 1.663$ artinya apabila terjadi kenaikan DPK

maka akan meningkatkan aset pada jangka pendek dan jangka panjang pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat disimpulkan secara langsung Dengan demikian H_0 2 di tolak dan H_a 2 di terima. Karena terdapat hubungan FDR dengan total aset bank umum syariah jangka pendek dan jangka panjang.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Diana dan Assa (2016) DPK terdapat hubungan dengan aset pada bank umum syariah. dengan hasil menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap total aset bank syariah.

Dalam jangka pendek, bank syariah cenderung mengelola likuiditasnya dengan baik untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah dan kewajiban jangka pendek lainnya. Peningkatan DPK memberikan bank akses lebih besar ke dana yang dapat digunakan untuk membiayai pembiayaan jangka pendek dan meningkatkan aset. Semakin tinggi DPK yang dimiliki bank, semakin banyak pula dana yang dapat dialokasikan untuk berbagai aset produktif seperti pembiayaan atau investasi dalam instrumen syariah. Teori ini menyatakan bahwa permintaan akan uang (liquid assets) dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, suku bunga, dan tingkat transaksi dalam perekonomian. Dalam jangka pendek, peningkatan DPK dapat meningkatkan dana yang tersedia untuk pembiayaan atau investasi bank. Namun, pada sisi lain, bank juga harus memperhatikan tingkat bunga atau imbal hasil yang kompetitif pada produk simpanan, untuk mempertahankan DPK.

Dalam jangka panjang, pertumbuhan DPK akan memungkinkan bank syariah untuk memperbesar portofolio asetnya. Bank dapat mengalokasikan dana DPK yang lebih besar untuk pembiayaan jangka panjang, investasi, dan ekspansi bisnis. Oleh karena itu, DPK yang stabil dan terus berkembang sangat penting untuk ekspansi aset bank dalam jangka panjang. Bank syariah yang berhasil mengelola DPK dalam jangka panjang dapat mendiversifikasi asetnya ke dalam berbagai jenis instrumen

investasi syariah, seperti sukuk dan saham syariah, untuk meminimalkan risiko dan memperbesar keuntungan. Ini juga dapat meningkatkan aset bank dari sisi nilai investasi. Bank syariah yang memiliki kemampuan untuk menjaga DPK secara berkelanjutan dapat memastikan adanya dana yang cukup untuk mendukung pembiayaan jangka panjang dan menumbuhkan aset. Bank yang stabil secara keuangan cenderung memiliki aset yang lebih besar dan lebih beragam

2. Hubungan FDR terhadap Aset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pendekatan Vector Error Correction Model (VECM)

Dalam Teori Koch dan MacDonald menyatakan bahwa hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan aset bank umumnya berhubungan positif. Artinya, ketika FDR meningkat, ini menunjukkan bahwa bank menggunakan proporsi yang lebih besar dari dana yang dihimpun (dari simpanan) untuk memberikan pembiayaan atau pinjaman. Peningkatan FDR dapat mencerminkan bahwa bank sedang memperluas portofolio pinjamannya, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan aset bank (Koch & MacDonald, 2015).

Berdasarkan hasil pengujian estimasi VECM menunjukkan bahwa terdapat hubungan FDR dengan aset pada Bank Umum Syariah jangka pendek dengan nilai T statistik $2.014 > 1.663$ dan jangka panjang dengan nilai T statistic $2.566 > 1.663$ artinya apabila terjadi kenaikan FDR maka akan meningkatkan aset pada jangka pendek dan jangka panjang pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat disimpulkan secara langsung H_0 1 di tolak dan H_a 1 di terima. Karena terdapat hubungan DPK dengan total aset bank umum syariah jangka pendek dan jangka panjang.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Azwar Rakhman (2020) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara bersama-sama dana pihak ketiga, NPF dan FDR berpengaruh terhadap total aset. menyatakan bahwa FDR terdapat hubungan dengan aset pada bank umum syariah. Hal ini secara langsung dapat simpulkan Dengan

demikian H_0 di tolak dan H_a di terima. Karena terdapat hubungan FDR dengan total aset bank umum syariah jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, bank harus memastikan keseimbangan antara pembiayaan yang diberikan dan likuiditas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. FDR menggambarkan seberapa besar pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan DPK, yang langsung berhubungan dengan aset bank. FDR yang lebih tinggi berarti bank lebih banyak memberikan pembiayaan, yang mengarah pada peningkatan aset. Sebaliknya, jika FDR rendah, bank lebih banyak menahan dana dalam bentuk likuid (misalnya kas atau deposito berjangka), yang dapat mengurangi jumlah aset produktif yang dimiliki bank. Dalam jangka pendek, bank harus mengelola risiko likuiditas dan risiko kredit. FDR yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan bahwa bank mengambil risiko besar dalam hal kredit, sementara FDR yang terlalu rendah mungkin menunjukkan bahwa bank tidak memanfaatkan dana yang dihimpun secara optimal. FDR yang terlalu tinggi dapat menyebabkan bank mengalami masalah likuiditas karena sebagian besar dana telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan, sehingga bank tidak memiliki cukup cadangan kas untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Sebaliknya, FDR yang rendah akan mengurangi aset produktif karena sebagian besar dana masih berada dalam bentuk likuid atau investasi yang tidak menghasilkan imbal hasil maksimal.

Dalam jangka panjang, FDR yang seimbang akan membantu bank syariah tumbuh secara berkelanjutan. Bank yang secara konsisten menjaga rasio FDR yang stabil dapat lebih mudah mengembangkan portofolio pembiayaan dan aset. Peningkatan FDR dapat menghasilkan pertumbuhan aset yang signifikan jika bank dapat mengelola risiko dengan baik. Dalam jangka panjang, bank yang memiliki FDR yang stabil akan memiliki portofolio aset yang kuat dan terdiversifikasi dengan baik, yang pada gilirannya memberikan kestabilan finansial. FDR yang sangat tinggi atau

rendah dalam jangka panjang bisa menciptakan ketidakseimbangan yang memengaruhi kesehatan finansial bank.

3. Hubungan NPF terhadap Aset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pendekatan Vector Error Correction Model (VECM)

Dalam Teori Saunders dan Cornett menjelaskan bahwa peningkatan NPF dapat mengindikasikan masalah dalam manajemen aset dan liabilitas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi total aset bank. Artinya, ketika NPF meningkat, hal ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak pembiayaan yang tidak produktif atau bermasalah, yang dapat mengindikasikan risiko yang lebih tinggi bagi bank. Peningkatan NPF dapat mengurangi kepercayaan investor dan deposan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan aset bank. Dengan kata lain, jika NPF tinggi, bank mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan asetnya karena masalah likuiditas dan risiko yang lebih besar (Saunders, A., & Cornett, 2018)

Berdasarkan hasil pengujian estimasi VECM menunjukkan bahwa terdapat hubungan NPF dengan aset pada Bank Umum Syariah jangka pendek dengan nilai T statistic $1.726 > 1.663$ dan jangka panjang dengan nilai T statistic $2.122 > 1.663$ artinya apabila terjadi kenaikan NPF maka akan meningkatkan aset pada jangka pendek dan jangka panjang pada Bank Umum Syariah. Hal ini berarti dapat disimpulkan secara langsung dengan demikian H_03 di tolak dan H_a3 di terima. Karena terdapat hubungan NPF dengan total aset bank umum syariah jangka pendek dan jangka panjang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Assa Fito Mohammad (2016) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel DPK, FDR dan NPF berpengaruh Positif terhadap total aset bank syariah. menyatakan bahwa NPF terdapat hubungan dengan aset pada bank umum syariah. Hal ini dapat disimpulkan Dengan demikian H_03 di tolak dan H_a3 di terima.

Dalam jangka pendek, NPF yang tinggi akan memengaruhi kualitas aset bank, karena pembiayaan yang bermasalah tidak menghasilkan arus kas yang diharapkan. Jika NPF meningkat, aset bank akan terpengaruh karena sebagian dari pembiayaan yang diberikan menjadi tidak produktif, dan bank harus mengalokasikan lebih banyak cadangan untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan. NPF yang tinggi akan mengurangi jumlah aset yang produktif karena pembiayaan yang bermasalah tersebut tidak menghasilkan pendapatan yang diinginkan. Hal ini akan menurunkan kualitas aset secara keseluruhan, karena sebagian besar aset tidak dapat mengalirkan pendapatan. Semakin tinggi NPF, semakin besar kemungkinan bank mengalami kerugian pada aset yang terkait dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang gagal bayar menyebabkan bank kehilangan potensi pendapatan dan dapat mempengaruhi struktur asetnya. Teori ini menyatakan bahwa bank harus mengelola keseimbangan antara pembiayaan yang diberikan dan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk mengelola likuiditas karena pembiayaan yang bermasalah mengurangi jumlah dana yang bisa digunakan kembali oleh bank. Jika bank memiliki NPF tinggi, ini bisa mengganggu perputaran dana yang dihasilkan oleh pembiayaan. Aset yang dihasilkan dari pembiayaan bermasalah akan terhenti, dan bank perlu mengalokasikan lebih banyak dana untuk menutupi kerugian atau risiko terkait pembiayaan tersebut.

Dalam jangka panjang, bank yang terus-menerus mengalami peningkatan NPF akan kesulitan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pembiayaan yang gagal bayar mengurangi kapasitas bank untuk melakukan ekspansi, karena sebagian dana yang tersedia telah terhambat oleh pembiayaan bermasalah. NPF yang tinggi dalam jangka panjang dapat menghalangi bank dalam melakukan ekspansi aset, karena sebagian besar aset yang terlibat dalam pembiayaan bermasalah akan terhenti atau bahkan menyebabkan kerugian. Sebaliknya, pengelolaan NPF

yang baik memungkinkan bank untuk mempertahankan aset yang stabil dan terus tumbuh. Dalam jangka panjang, bank yang memiliki NPF tinggi pada jenis pembiayaan tertentu akan menghadapi penurunan aset jika tidak ada diversifikasi yang memadai. Sebaliknya, bank yang mendiversifikasi jenis pembiayaan dan investasinya akan lebih mampu bertahan dan meningkatkan aset meskipun ada peningkatan NPF pada beberapa sektor.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan secara Uji Estimasi VECM jangka pendek menunjukkan adanya hubungan DPK dengan aset pada Bank Umum Syariah jangka pendek dengan nilai t-statistik sebesar $1.763 > 1.663$. Dan hasil Uji Estimasi VECM jangka Panjang menunjukkan adanya hubungan DPK dengan aset pada Bank Umum Syariah jangka Panjang dengan nilai t-statistik sebesar $2.652 > 1.663$. Berdasarkan hasil Uji Estimasi VECM jangka pendek menunjukkan adanya hubungan FDR dengan aset pada Bank Umum Syariah jangka pendek dengan nilai t-statistik sebesar $1.726 > 1.663$. Dan hasil Uji Estimasi VECM jangka Panjang menunjukkan adanya hubungan FDR dengan aset pada Bank Umum Syariah jangka panjang dengan nilai t-statistik sebesar $2.122 > 1.663$. Berdasarkan hasil Uji Estimasi VECM Jangka Pendek menunjukkan adanya hubungan NPF dengan aset pada Bank Umum Syariah jangka pendek dengan nilai t-statistik sebesar $2.014 > 1.663$ dengan nilai koefisien sebesar 0.355 . Dan hasil Uji Estimasi VECM jangka Panjang menunjukkan adanya hubungan NPF dengan aset pada Bank Umum Syariah jangka Panjang dengan nilai t-statistik sebesar $2.566 > 1.663$.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat menambah objek penelitian sebagai sampel dengan rentang waktu yang lebih lama. Hal ini agar hasil analisis penelitian dapat mendetail serta dapat menggambarkan kondisi yang terjadi.
2. Bagi Bank Umum Syariah diharapkan untuk lebih gencar lagi dalam mempromosikan, meningkatkan serta memberikan kemudahan dalam

proses pelayanan produk tabungan, karena semakin banyak masyarakat menggunakan produk tabungan (menyimpan dana di bank Syariah) maka nilai dari DPK juga akan meningkat, pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat sehingga juga akan mempengaruhi pertumbuhan asset di Bank Umum Syariah Indonesia.

3. Bagi masyarakat umum, diimbau untuk menggunakan produk-produk bank Syariah khususnya tabungan, karena dengan meningkatnya nilai DPK akan membuat penyaluran pembiayaan juga meningkat. Banyaknya pembiayaan yang disalurkan membuat perputaran roda perekonomian juga meningkat, sehingga akan memberikan efek yang baik bagi pertumbuhan asset Bank Umum Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sani Alhusain. (2021). *Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*.
- Adiwarman Karim. (2016). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adhivinna, Vidya Vitta, Mega Selawati, dan M. Sulkhanel Umam. (2022). Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa, *JAA (Online)*, Vol. 6 No. 2, diakses dari <https://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/viewv/138/77> pada tanggal 17 Oktober 2024.
- Adzimatinur, F., Hartoyo, S, & Wiliasih, R. (2014). Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 3(2), 106-131.
- Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Ahmad Fadlan Lubis. (2016). Analisis Pertumbuhan Total Asset Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 1, No. 1*.
- Aisy, D. R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 3*, 249-265.
- Aisy, Diamantin Rohadatul. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Aisyah, Siti. (2018). "Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 dan 2017". Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Ali Maulidi. (2016). *Teknik Belajar Statistik 2*. Jakarta Timur: Alim's Publishing.
- Ali, Masyud. (2004). *Asset Liability Management*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Alimah, D. D., & Putra, R.R. (2018). *Pengaruh Pembelajaran Mobile Menggunakan Aplikasi “Sistem Kehidupan Vertebrata (3). Terhadap Kemampuan Kognitif Peserta Didik Pada Materi Sistem Koordinasi.* Jurnal Bioedusiana.
- Andriaan Sudianto. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Annisa, Nurul dan Riri Mayliza. (2018). Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan Biro Quality Assurance PT. Semen Padang. *Jurnal Ekonomi 3, No. 1.*
- Antonio, Muhammad Syafi’i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta. Gema Insan Press.
- Ascarya. (2008). *AkaddanProduk Bank Syariah.*Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Aziza, R. V., & Mulazid, A. S. (2017). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performig Financing, Capital adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1.
- Banoon, M. (2014). *Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia,* Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Basuki, A. T., & Prawoto, N. Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS.* Depok: PT Rajagrafindo Persada. 1(1), 36–40.
- Basuki, Tri, A., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews).* Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt. (2005). *Financial Management Theory And Practice (Eleventh ed.).* Ohio: South Western Cengage Learning.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management (Fifteenth Edition).* United States: Cengage Learning.
- Brigham, Eugene F., dan Joel F. Houston. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Buku 1,* Terjemahan oleh Novietha Indra Sallama dan Febriany Kusumastuti, Edisi 14, Jakarta: Salemba Empat
- Brigham, Houston, & Joel. (2022). *Fundamental Of Financial Management.* Boston : Cengage Learning.

- Dahlan, A. (2018). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Dendawijaya, Lukman. (2014). *Manajemen Perbankan*, Cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djuwita, D., & Mohammad, A. F. (2016). *Pengaruh Total DPK, FDR, NPF dan ROA terhadap Total Asset*. Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, Vol. 8, No. 1, 281-297.
- Djuwita, Diana dan Assa Fito Mohammad. 2016. *Pengaruh Totak DPK, FDR, NPF, dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia*. Retrieved From IAIAN Syekh Nurjati Cirebon.
- Endres G. M., and Mancheno-Smoak L. (2008). The Human resource Craze: Human Performance Improvement and Employee Engagement. *Organizational Development Journal* vol. 26, 69-78.
- Eugene F. Fama. (1972). *The Theory of Finance*. New York: Holt. Rinehart and Winston.
- Farianti, Rizki. (2019). Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating, *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1).
- Faruqi, L. (2020). Analisis Faktor- Faktor Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2009 - 2019. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 16–28.
- Firmansyah, M. Anang. (2019). *Pemasaran Produk dan Merek*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Firmansyah, M. Anang. 2019. *Pemasaran (Dasar dan Konsep)*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media.
- Ghozali, I. (2014). *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Gitman, L.J.; Zutter, C.J. (2020). *Principles of Managerial Finance*. 13e. Boston: Pearson.
- Gitman. (2020). *Contemporary Financial Management*. Boston: Cengage Learning.

- Gujarati, Damodar N. (2004). *Basic Econometrics*. 5 ed. New York: The McGraw–Hill Companies.
- Hamidi, M., & Ismail, A. (2022). Hubungan DPK, FDR, dan NPF terhadap Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*.
- Harahap, S. (2014). *Analisis Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Haris, H. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara.
- Hery. (2017). *Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep dan Analisis*. Jakarta: Grasindo.
- Horne V. James dan John M Wachowicz. (2005). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Fundamental of Financial Management)*. Edisi 12. Diterjemahkan oleh Dewi Fitriyani. Jakarta: Salemba Empat
- Horngren, Charles T. dan Walter T Harrison Jr. (2007). *Akuntansi Jilid Satu*. Edisi Tujuh. Jakarta: Erlangga.
- Ichsan, Nur dan Akhiroh, Masngadatul. (2017). Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Perbankan Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010- Maret 2017. *Jurnal Akses. Volume 12, Nomor 23*. Fakultas Ekonomi: Universitas Wahid Hasyim 2017.
- Irham Fahmi. (2014). *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indirani, Latti. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah di Indonesia. Bogor: Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Imam Wahyudi. (2013). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irma setyawati, (2015). *Determinan pertumbuhan total asset dengan pendekatan variabel spesifik dan pangsa pasar pada perbankan syariah di Indonesia*.
- Irmawati, Erlyta. (2014). Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, dan NPF terhadap Profitabilitas. Skripsi. Semarang: Program Studi Manajemen Universitas Diponegoro.

- Ismail, (2014). *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir, (2014). *Dasar-Dasar Perbankan Syari'ah*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- James C. Van Horne, John M. Wachowicz, Jr. (2018). *Fundamentals of Financial Management Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Buku 1-Ed.12. Jakarta: salemba empat
- Juan, Ng Eng dan Wahyuni, Ersa Tri. (2013). *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Julius R. Latumaerissa. (2017). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan:Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2020). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khariry, Mukhlan dan Meina Wulansari Yusniar. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal: studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia peridode 2011 – 2014. *Jurnal wawasan manajemen Vol. 04 No. 02:113 – 125*
- Kuncoro. (2002). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Jakarta.
- Koch, T. W., & MacDonald, S. S. (2015). *Bank Management (8th Editio)*. Cengage Learning.
- Lukman Dendawijaya. (2013). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lailatuniyar, Suci. (2017). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Dan BI Rate Terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia (Periode 2011-2015). Skripsi. Banten: UIN Syarif Hidayatullah.
- Lubis, A. Fadlan. (2016). *Analisis Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 1, 102-108. Widyastuti, R. (2018). *Determinan Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset*

Bank Umum Syariah di Indonesia 2015-2016 (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).

M. Anang Firdaus. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Mahyus. (2015). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Margaretha, farah dan Aditya Rizky Ramadhan. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada industri manufaktur di Bursa efek Indonesia. *Junal bisnis dan akuntansi*. Vol. 12. No. 2: 119 – 130

Martini. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*". Jakarta: Salemba Empat,

Mishkin, F. (2016). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (Fifth Edit). Pearson.

Mukhlani, Khariry dan Meina Wulansari Yusniar. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014). *Jurnal Wawasan Manajemen*. Vol 4. No. 2, hal 113-125.

Mulyadi, 2018. *Akuntansi Keuangan Menengah*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Mohammad, A. F. (2016). *Total Aset Bank Umum Syariah Di Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon*.

Muhammad. (2014). *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muhammad Syafi'i Antonio. (2015). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.

Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Nadhiera Ahya, And Lavlimatria Esya. (2019). Pengaruh Npf, Bopo, Gdp Dan Sbis Terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Di Indonesia." *Media Ekonomi* 27, No. 1.

- Nurul Ichsan Hasan. 2014. Pengantar Perbankan. Yogyakarta: Soeprianta. Refrensi, edisi pertama.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2023. *Laporan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Peggi Wahyu Rofi'ah. (2017). Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Mudharabah, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018).
- Pratiwhi, Yuria. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan proporsi aset perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5, 130 No.1.
- Rivai dan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Reni Widyastuti dan Siti Achiria. (2018). *Determinan yang mempengaruhi pertumbuhan total asset bank umum syariah di Indonesia*.
- Robert C. Merton. (1990). *Continuous-Time Finance*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- Rosi Oktari dan M. Ishaq Dwi Putra. (2021). *Berdirinya Bank Syariah Indonesia*. Dipublikasi 04 Februari 2021. Referensi: <https://indonesiabaik.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia.html>.
- Sandu Siyoto, SKM., M. K., & M. Ali Sodik, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Cetakan 1, Vol. 7, Issue 2). Literasi Media.
- Sari, D. K. (2015). Profil kemampuan berpikir kreatif mahasiswa pada perkuliahan praktikum biokimia. Seminar Nasional Universitas Pakuan Bogor. 29 Agustus 2015, Bogor, Indonesia.
- Saunders, A., & Cornett, M. M. (2018). *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach* (9th Editio). McGraw-Hill Education.
- Setiadi. (2013). *Konsep dan Praktik Penulisan Riset Kepeawatan* Edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2018). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiri, S. dan Bogat Agus Riyono. (2014). *Akuntansi Pengantar 1, Edisi 7*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Sumartik. (2018). *Manajemen Perbankan*. Sidorajo: UMSIDA PRESS.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Syukri Iska. 2014. *Sistem Perbankan Syariah Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Tariqullah Khan. (2008). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Bumi Askara.
- Vani Adelin. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*. Vol.1 No.3.
- W, Reni dan Siti A. (2016). Determinan yang mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. Vol.1 No.1